

**IMPLEMENTASI *URBAN FARMING* DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**NEDIA SAWAYA
NPM. 2216041157**



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

**IMPLEMENTASI *URBAN FARMING* DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Oleh

NEDIA SAWAYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI *URBAN FARMING* DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Nedia Sawaya

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah perkotaan menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengembangkan program *Urban Farming* sebagai strategi penguatan ketahanan pangan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Urban Farming* di Kota Bandar Lampung serta tantangan yang memengaruhinya dengan menggunakan model implementasi kebijakan Jan Merse. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan program, yang tercermin dari partisipasi aktif warga dalam pembentukan kelompok, penyediaan lahan secara swadaya, dan kontribusi tenaga. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan pada aspek pembagian potensi dan isi kebijakan, di mana alokasi anggaran rutin masih terbatas, pendampingan teknis belum merata, serta koordinasi antarinstansi yang masih bersifat parsial. Selain itu, informasi kebijakan lebih menekankan pada substansi kegiatan dibandingkan sosialisasi identitas program secara formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan *urban farming* sangat bergantung pada kekuatan kohesi internal kelompok masyarakat dan sinergi yang konsisten antara pemerintah daerah dengan komunitas lokal untuk menjamin keberlanjutan program.

Kata Kunci: Pertanian Perkotaan, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat, Ruang Terbuka Hijau, Bandar Lampung.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF URBAN FARMING IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

Nedia Sawaya

Efforts to meet food security in urban areas demand policies that are not only production-oriented but also focused on community empowerment and self-reliance. The Bandar Lampung City Government has developed the Urban Farming program as a strategy to strengthen food security while simultaneously enhancing community welfare. This study aims to analyze the implementation of Urban Farming in Bandar Lampung City and the challenges affecting it, utilizing Jan Merse's policy implementation model. The research method employed is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results indicate that community support is a key factor in the program's success, as reflected by the active participation of citizens in group formation, independent land provision, and labor contributions. Nevertheless, policy implementation still faces challenges regarding the distribution of potential and policy content, where routine budget allocations remain limited, technical assistance is not evenly distributed, and inter-agency coordination is still partial. Furthermore, policy information emphasizes the substance of activities rather than formal socialization of the program's identity. This study concludes that the success of urban farming depends heavily on the strength of internal cohesion within community groups and consistent synergy between the local government and local communities to ensure program sustainability.

Keywords: *Urban Farming, Food Security, Community Empowerment, Green Open Space, Bandar Lampung.*

Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI URBAN FARMING
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

Nedla Sawaya

Nomor Pokok Mahasiswa

2216041157

Jurusan

Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP
NIP. 19830815 201012 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

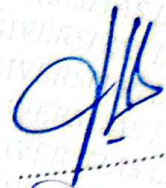
Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M.Si
NIP. 19700914 2000604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

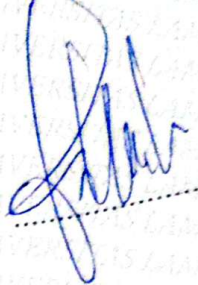
Ketua

: **Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.**



Penguji

: **Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Nedia Sawaya
NPM. 2216041157

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nedia Sawaya, lahir di Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 05 Maret 2005. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak D dan Ibu N. Penulis menempuh pendidikan formal diawali dari TK Dharma Wanita Raudatul Ulum yang selesai pada tahun 2010, Lalu melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Ketapang (2010-2016), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Sungkai Selatan (2016-2019), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Kotabumi (2019-2022).

Pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjalani masa studi, penulis tergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara (Himagara) menjadi anggota bidang Hubungan Luar. Lalu pada tahun 2024, penulis memperoleh kesempatan untuk berkontribusi sebagai asisten Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik (Lab AKP) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, penulis terlibat aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama dosen, serta berpartisipasi dalam beragam aktivitas jurusan. Selain itu, penulis juga telah menerbitkan jurnal ilmiah sebagai bentuk kontribusi akademik. Pada periode Januari–Februari 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 hari di Desa Sri Jaya, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya, pada periode Juli–Agustus 2025, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 40 hari di Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Maka apabila engkau telah selesai, tetaplah berusaha.”

(QS. Al-Insyirah 94: 7)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk merubah dunia”

(Nelson Mandela)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release.”

(Taylor Swift)

“I've done my time, I did my part, But I'm just getting started”

(Nedia Sawaya)

PERSEMBAHAN



Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, dan karunia-Nya. Penulis dengan tulus dan kerendahan hati mempersembahkan karya tulis ini kepada:

Mama dan Papa Tercinta

Dengan penuh rasa syukur dan hormat yang mendalam, penulis mengucapkan terima kasih atas setiap doa yang tiada henti, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang senantiasa diberikan dalam setiap langkah perjuangan penulis. Segala ketulusan tersebut menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Terima kasih atas ilmu pengetahuan, bimbingan, serta teladan yang telah diberikan selama proses pendidikan. Seluruh pengalaman, nilai, dan wawasan yang diperoleh akan menjadi bekal berharga bagi penulis untuk melangkah di masa depan.

Almamater Tercinta,

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi *Urban Farming* di Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai masukan, arahan, bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi telah memberikan bimbingan, masukan, serta berbagi ilmu dan pengalaman luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini dan dalam masa perkuliahan penulis. Penulis juga berterima kasih kepada beliau karena sudah menjadi sosok pendidik dan figur keibuan dalam dunia perkuliahan yang senantiasa memberikan motivasi, perhatian, serta dukungan dalam setiap suka dan duka yang penulis hadapi. Berkat dorongan dan keteladanan beliau, penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana ini dengan baik. Penulis menjadikan beliau sebagai panutan yang menginspirasi untuk terus belajar, berkembang, dan kelak mampu memberikan manfaat serta menjadi pribadi yang berkontribusi sebagaimana beliau. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan perlindungan, kesehatan, dan keberkahan kepada Ibu beserta keluarga dalam setiap langkah kehidupan.

2. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembahas, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu pengetahuan, wawasan, serta pandangan akademik yang telah diberikan sehingga mampu memperluas cara berpikir penulis dalam menyusun skripsi ini. Saran, masukan, serta kritik yang disampaikan secara objektif dan membangun menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga, sehingga membantu penulis dalam memperbaiki dan menyempurnakan penulisan skripsi ini agar menjadi lebih sistematis.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Susana Indriyati caturiani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh staff dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama masa perkuliahan.
8. Seluruh dosen Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik (Lab AKP). Kepada seluruh dosen Lab AKP: Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si., Ibu Anisa Utami, S.IP., M.A., Ibu Vina Karmila Sari, S.Pd., M.Si., Bapak M. Irsyad Fadoli, S.A.P., M.A.P., Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P., Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si, dan Bapak Apandi, S.Sos., M.Si., Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi bagian dari asisten Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik. Segala bimbingan, arahan, serta pengalaman berharga

yang diperoleh selama menjalankan peran tersebut memberikan banyak pembelajaran dan menjadi bekal penting bagi penulis dalam pengembangan akademik.

9. Seluruh informan penelitian, yaitu Mba Agus Mutia, Mba Dhenok Nuniek Auliya, S.P., M.P., Ibu Laila Yusro, Ibu Ine Indriastuti, dan Bapak Cepi dari Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, Bapak Suherman dari BAPPERIDA Kota Bandar Lampung, Ibu Ir. Sunarti dan Ibu Juraedah Natalia dari Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, Bapak Ruslan, S.I.Kom selaku Lurah Sidodadi, Ibu Suyadmi dan Ibu Ratu Maryana dari KWT Sedap Malam, Ibu Desti dan Ibu Mardalena dari KWT Delima, Ibu Betty Mailina dari KWT Barokah Way Pios, Ibu Heni, Ibu Anggun, dan Ibu Puwati dari KWT Fortuna, Ibu Yuli Astuti dari Komunitas Ayo Menanam, serta Bapak Aji selaku penggiat hidroponik mandiri di Kota Bandar Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu dan Bapak dalam meluangkan waktu, memberikan informasi, serta berbagi pengalaman yang sangat berharga demi kelancaran pelaksanaan penelitian ini.
10. Mama dan Papa tercinta, sosok yang paling berharga dalam hidup penulis, terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti diberikan. Dukungan moril maupun materil dari mama dan papa selalu menjadi kekuatan utama yang mengiringi setiap langkah penulis. Tanpa kehadiran, pengorbanan, dan doa yang terus mengalir, penulis tidak akan mampu sampai pada titik ini. Segala bentuk pengorbanan dari mama dan ayah telah menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih mama dan papa karena sudah menjadi rumah bagi penulis, tempat bercerita, berkeluh kesah, serta pendukung nomor satu dalam setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih atas cinta yang tulus tanpa syarat. Terima kasih karena sudah selalu mengusahakan segala hal untuk penulis. Terima kasih karena sudah menjadi orangtua penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, kemudahan dalam setiap langkah, rezeki yang berkah dan berlimpah, serta umur yang panjang dan penuh manfaat bagi mama dan

papa. Semoga penulis kelak dapat membalas semua kebaikan tersebut dan menjadi kebanggaan seperti yang mama dan papa harapkan.

11. Enan dan Adik tersayang penulis, terima kasih atas dukungan, dan doa yang kalian berikan kepada penulis. Meskipun sering bercanda, keusilan, bahkan pertengkaran, hal itu justru sedikit menjadi penghibur dan penyemangat tersendiri bagi penulis.
12. Keluarga besar Sidi dan Keluarga Besar Datuk, terima kasih atas doa, perhatian, serta dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Terima kasih atas segala bentuk bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk penulis.
13. Melsa Amrina, terima kasih penulis ucapkan atas kebersamaan, dukungan, dan kehadiran dalam menemani penulis sepanjang proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Terima kasih telah membersamai penulis sejak masa mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan, menjadi teman duduk di kelas, teman belajar, teman berdiskusi, serta teman berbagi cerita yang selalu menghadirkan tawa, semangat, dan dukungan di setiap proses yang dilalui. Penulis mendoakan semoga rina dipertemukan dengan jodoh yang baik, yang dapat *men-treat* dengan layak sehingga tidak lagi merasa galau dan disia-siakan oleh pasangan yang tidak tepat.
14. Isnaini, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dan kebersamaan yang telah diberikan sejak masa awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan. Menjadi teman berbagi cerita, dan canda tawa. Terima kasih atas bantuan yang sangat berarti, termasuk kesediaan meminjamkan kendaraan selama masa penelitian maupun sebelumnya, yang sangat membantu kelancaran aktivitas penulis. Penulis mendoakan Nay senantiasa dilimpahkan rezeki, dan kemudahan, dalam setiap langkah kehidupan, serta dipertemukan dengan jodoh yang baik dan sesuai dengan harapannya.
15. Nadia Eva Prasanti, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan, bantuan, dan ketulusan yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi teman yang baik, membersamai penulis sejak masa mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan. Terima kasih karena sudah membolehkan penulis sering menginap, saling mengingatkan tugas, hingga membantu dalam

berbagai proses perkuliahan, yang sangat berarti bagi penulis. Penulis mendoakan semoga Eva senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap langkah, rezeki yang berlimpah serta dipertemukan dengan jodoh yang baik dan layak sebagai balasan atas segala kebaikannya.

16. Jessica Clyudiea, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih telah menjadi teman makan, teman bercerita, serta teman berbagi informasi yang terkadang hadir menemani penulis di situasi tertentu. Meskipun menjadi teman yang sedikit memberikan ilmu namun banyak memberikan kata-kata bermakna. Penulis mendoakan semoga Jeje diberikan kebahagiaan dan dipertemukan dengan sosok pasangan yang baik dari segi sifat dan baik dipandang mata.
17. *Geng Squad*. Ratna Wulandari, Nadia Mutiara Dewi, dan Aben Sasmita penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang terus terjaga hingga saat ini. Persahabatan yang terjalin sejak masa SMP tetap bertahan meskipun jarang bertemu, namun selalu hadir dan memberikan dukungan pada setiap tahapan penting dalam proses penyusunan skripsi penulis. Kehadiran, doa, dan perhatian yang diberikan menjadi bentuk dukungan moral yang sangat berarti bagi penulis. Penulis mendoakan semoga persahabatan ini senantiasa terjaga, selalu solid dan penuh kebahagiaan, serta masing-masing diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan ke depan.
18. *Asdudu* (Aslab 22), Yoanna Angelica Octavia Purba, Reza Tio Saputra, Aldiansah Pratama, Muhammad Iqbal Ramadhani, Yolanda Natsya, Berkat Kasih Simbolon, Melsa Amrina, dan Isnaini penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan selama menjalani tugas sebagai asisten Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik (AKP). Terima kasih atas kehadiran, perhatian, serta usaha untuk selalu hadir dan memberikan dukungan pada setiap tahapan penting dalam proses penyusunan skripsi penulis. Penulis berharap semoga teman-teman *asdudu* senantiasa diberikan kelancaran dalam studi maupun aktivitas lainnya serta kesuksesan dalam mencapai tujuan masing-masing.

19. *The Tardy Stars*. Naura Ramadia, Lia Oktafiana, Jessica Clyudiea, Mairani Listri, Refando Adel Novandra, M Rafki Arafat. Terima kasih telah selalu mengusahakan kehadiran dan memberikan semangat pada setiap tahapan penting dalam proses penyusunan skripsi penulis. Teman yang seperti keluarga yang penulis temui pada masa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Penulis berharap semoga kebersamaan dan kekompakan ini senantiasa terjaga, serta masing-masing diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan ke depan.
20. Tutung Tersayang, kucing kesayangan penulis yang setia menemani sejak masa menjadi mahasiswa baru hingga akhir proses penelitian. Terima kasih telah menjadi teman setia yang selalu menghadirkan keceriaan, membantu menjaga semangat, dan memperbaiki suasana hati penulis di tengah lelahnya proses perkuliahan dan penyusunan skripsi. Kehadiran Tutung dengan tingkah lucunya menjadi penghibur bagi penulis.
21. *The Script, Justin Bieber, and Taylor Swift*, terima kasih atas karya-karya luar biasa yang disajikan melalui lagu-lagu yang menemani penulis selama proses penyusunan skripsi. Musik yang dihadirkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sumber semangat yang mampu membangkitkan suasana hati di tengah lelahnya begadang selama proses penulisan. Setiap lagu menjadi teman setia yang mengiringi penulis dalam berpikir, menulis, dan menyelesaikan setiap tahapan skripsi, serta memberikan kenyamanan dan motivasi agar tetap bertahan hingga akhir.
22. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, perhatian, serta kontribusi yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Setiap bentuk bantuan, motivasi, dan doa yang diberikan memiliki peran penting dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dan membawa keberkahan bagi semua pihak.

23. Kepada diri penulis sendiri, terima kasih atas seluruh perjuangan, kekuatan, dan keteguhan yang telah dijalani hingga sampai pada tahap ini. Setiap proses yang dilalui, baik yang terasa ringan maupun berat, telah membentuk ketangguhan dan kedewasaan dalam diri penulis. Terima kasih atas usaha yang terus diupayakan, atas kemauan untuk belajar dari setiap pengalaman, serta keberanian untuk terus berkembang dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih tetap berusaha ketika ingin menyerah, dan menghargai setiap langkah kecil dalam mengejar masa depan. Terima kasih karena selalu berusaha untuk terus belajar setiap hari. *So proud of u* telah sampai di tahap ini dan tidak berhenti berjuang. *I hope all the struggles you have gone through will lead to truly satisfying results in the future. May the future you dream of come true.*

Bandar Lampung, 29 Januari 2026

Nedia Sawaya

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Praktis	9
1.4.2 Manfaat Teoritis	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	19
2.2.1 Kebijakan Publik	19
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik	22
2.2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik	26
2.3 Konsep <i>Urban Farming</i>	28
2.3.1 Pengertian <i>Urban Farming</i>	28
2.3.2 Urgensi dan Peranan <i>Urban Farming</i>	30
2.3.3 Jenis-Jenis <i>Urban Farming</i> (Pertanian Perkotaan)	32
2.3.4 Manfaat <i>Urban Farming</i>	37

2.4 Kerangka Pemikiran	40
III. METODE PENELITIAN	43
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
3.2 Fokus Penelitian	43
3.3 Lokasi Penelitian	46
3.4 Sumber Data	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6 Teknik Analisis Data.....	52
3.7 Teknik Keabsahan Data	54
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung	56
4.1.1 Sejarah Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung	56
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung	58
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung	61
4.2 Hasil Penelitian.....	66
4.2.1 Implementasi <i>Urban Farming</i> di Kota Bandar Lampung	66
4.2.2 Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan <i>Urban Farming</i>	94
4.3 Pembahasan	107
4.3.1 Implementasi <i>Urban Farming</i> di Kota Bandar Lampung.....	107
4.3.2 Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan <i>Urban Farming</i>	131
V. PENUTUP	139
DAFTAR PUSTAKA.....	144

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Bandar Lampung.....	2
2. Jenis Penggunaan Lahan Kota Bandar Lampung.....	4
3. Penelitian Terdahulu.....	8
4. Data Informan Penelitian	50
5. Indikator Pembagian Potensi Antar Aktor	90
6. Matrix Hasil Penelitian untuk Implementasi Urban Farming di Kota Bandar Lampung.....	129
7. Matriks Hasil Penelitian untuk Faktor Penghambat Implementasi Urban Farming di Kota Bandar Lampung	139

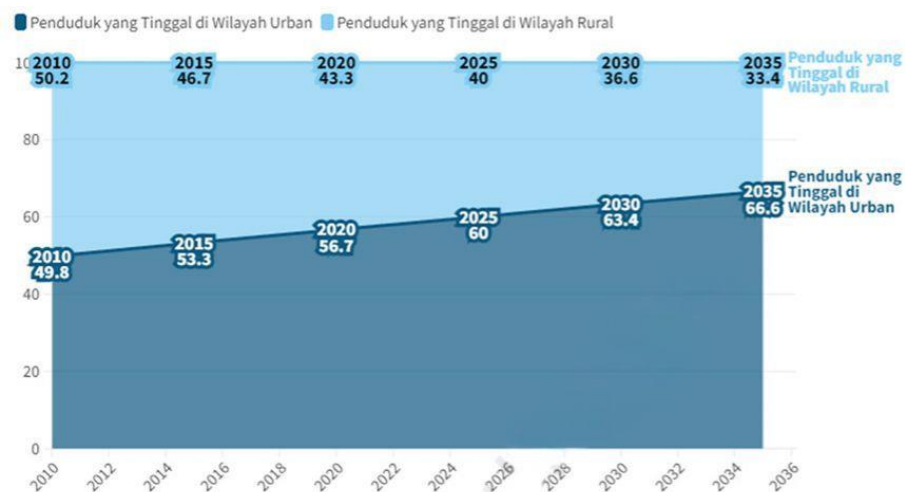
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Persentase Jumlah Penduduk yang Tinggal di Wilayah Urban Indonesia.	1
2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Jan Merse (dalam Kadji, 2015).....	26
3. Kerangka Berpikir Penelitian.....	41
4. Komponen Analisis Data Model Miles, Huberman, dan Saldana (2014).....	52
5. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung	61
6. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Lapangan Oleh Dinas Pertanian Sebagai Bentuk Program Pelangi Pagiku.....	76
7. Dokumentasi Kegiatan Penyerahan Bibit Cabai Sebagai Bentuk Program P2B	78
8. Dokumentasi Pendistribusian Bantuan Bibit dan Media Tanam.....	80
9. Taman Bermain Sebagai Bentuk Program H2M di KWT Sedap Malam, Kelurahan Sidodadi	81
10. Hasil Budidaya Tanaman Hidroponik Oleh Komunitas Ayo Menanam	86
11. Lahan Milik Anggota KWT Yang Dikelola Sebagai Lokasi <i>Urban Farming</i>	100

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya urbanisasi telah memberikan tekanan besar terhadap daya dukung lingkungan serta membawa dampak signifikan terhadap tata ruang kota, khususnya pada ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan (Sinaga dkk, 2025). Urbanisasi merupakan salah satu karakteristik utama dari pembangunan sosial dan ekonomi global di abad ke-21. Isitilah ini merujuk pada pergeseran populasi dari wilayah perdesaan ke perkotaan. Proses ini memicu pertumbuhan kota yang pesat serta menyebabkan perubahan struktural pada pemanfaatan lahan dan tatanan sosial (Wahyudi, 2024). Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), diperkirakan pada tahun 2035, persentase penduduk urban di Indonesia akan mencapai 66,6 persen.



Gambar 1. Persentase Jumlah Penduduk yang Tinggal di Wilayah Urban Indonesia.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Berdasarkan gambar 1, rata-rata perubahan persentase jumlah penduduk yang tinggal di wilayah urban di Indonesia pada 2010-2035 adalah 3,36 persen. Perubahan persentase terbesar terjadi pada tahun 2010-2015 sebesar 3,5 persen, sedangkan terkecil terjadi pada tahun 2030-2035 yaitu 3,2 persen. Hal ini juga sejalan dengan laporan *World Bank* yang menyatakan bahwa laju urbanisasi di Indonesia yang awalnya cepat, saat ini berada pada tahap normal dan pada tahun 2045 diprediksi bahwa 70 persen dari masyarakat Indonesia akan tinggal di wilayah kota. Sementara itu, sebesar 57 persen dari populasi masyarakat kota di Indonesia saat ini tinggal di wilayah metropolitan, dan selebihnya (43 persen) tinggal di luar wilayah metropolitan.

Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di wilayah urban saat ini lebih besar dibandingkan dengan wilayah pedesaan (rural). Meskipun urbanisasi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, laju yang tak terkendali ini secara langsung menciptakan tekanan hebat terhadap daya dukung lingkungan perkotaan. Salah satu dampak paling krusial adalah konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun seperti pemukiman, industri, dan infrastruktur. Fenomena ini secara sistematis menggerus ketersediaan RTH dan pada gilirannya melahirkan kerentanan baru, yaitu ancaman terhadap ketahanan dan kemandirian pangan kota.

Kota-kota di Pulau Sumatera merupakan wilayah dengan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun, serta diperburuk dengan pola perkembangan kota yang cenderung melebar atau *urban sprawl*. Kota Bandar Lampung sendiri menjadi salah satu contoh dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yang pada akhirnya mendorong perkembangan kota secara meluas (Fran, 2022).

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Bandar Lampung

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ²
2020	1.166.066	5.913
2021	1.184.949	6.008
2022	1.209.937	6.135
2023	1.100.109	5.986
2024	1.077.664	5.864

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 1, Data Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, adanya tren peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga 2022, yang puncaknya mencapai lebih dari 1,2 juta jiwa dengan tingkat kepadatan di atas 6.100 jiwa per km². Peningkatan ini mengindikasikan adanya laju pertumbuhan penduduk yang memberikan tekanan besar terhadap daya dukung lingkungan dan ketersediaan lahan di kota. Namun demikian, perlu dicermati adanya penurunan angka yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun terjadi penyesuaian data pada dua tahun terakhir, angka kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung yang konsisten berada di atas 5.800 jiwa per km² menegaskan statusnya sebagai kawasan urban yang sangat padat.

Tingginya tingkat kepadatan penduduk ini memiliki implikasi langsung terhadap meningkatnya persaingan pemanfaatan lahan, yang seringkali mengorbankan lahan hijau dan pertanian untuk dialihfungsikan menjadi area pemukiman dan komersial. Akibat dari tekanan kependudukan ini adalah semakin menyempitnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kota. Kenyataan ini diperkuat oleh data dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 2021-2041, yang menunjukkan proporsi RTH publik di kota ini hanya sekitar 4% dari total luas wilayah. Angka ini sangat jauh dari amanat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Pengelolaan RTH, yang mewajibkan kota memiliki RTH minimal 30%, terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Kondisi minimnya RTH dan lahan alami di kawasan perkotaan ini tidak hanya berdampak pada terganggunya fungsi ekologis, tetapi juga secara langsung melemahkan ketahanan pangan kota.

Keterbatasan lahan dan alih fungsi lahan yang terjadi di Bandar Lampung sangat mengancam ketahanan pangan. Kondisi ini diperparah oleh maraknya alih fungsi lahan atau konversi lahan yang mengubah fungsi lahan pertanian menjadi area nonpertanian. Berbagai bentuk pembangunan tersebut menyebabkan semakin menyusutnya wilayah pertanian di kota, yang berdampak langsung pada ketersediaan serta stabilitas pangan di wilayah sekitarnya. Menurut data hasil pra-riset pada tanggal 24 Juli 2025 bersama Bapak Erwin selaku Kepala Dinas Pertanian 2025, luas lahan pertanian Kota Bandar Lampung hanya sebesar 466,8 hektare yang tersebar di 10 kecamatan, dengan konsentrasi utama di Kecamatan

Rajabasa, Tanjung Senang, dan Sukarama, sementara kecamatan lain rata-rata hanya memiliki 2-3 hektare. Tren penyusutan lahan produktif ini dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel 2. Jenis Penggunaan Lahan Kota Bandar Lampung

Jenis Lahan	Luas Panen		(Hektar)			
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lahan Sawah	648,31	625,1	623,1	500,9	443,74	469,68
Lahan Pertanian Bukan Sawah	4.439	4.385,9	4.317,9	3.974,1	3.882,26	3.824,48
Lahan Bukan Pertanian	14.634,49	14.711	14.781	15.247	15.396	15.427,84
Jumlah	19.722	19.722	19.722	19.722	19.722	19.722

Sumber: Data Dokumentasi Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat adanya tren alih fungsi lahan yang signifikan di Kota Bandar Lampung selama periode 2019-2024. Luas lahan sawah sebagai area pertanian paling produktif mengalami penyusutan konsisten setiap tahunnya, berkurang secara drastis dari 648,31 hektare pada 2019 menjadi 469,68 hektare pada 2024. Sebaliknya, luas lahan bukan pertanian menunjukkan peningkatan yang terus-menerus, bertambah dari 14.634,49 hektare menjadi 15.427,84 hektare pada periode yang sama. Data ini mengkonfirmasi bahwa tekanan urbanisasi telah menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun, yang memperkuat urgensi penerapan program *urban farming* sebagai strategi mitigasi.

Ketahanan pangan adalah isu mendasar yang mendapat perhatian serius, baik secara kebijakan maupun praktis, yang berkaitan langsung dengan kemampuan suatu negara untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduknya (Salasa, A. R. 2021). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, secara eksplisit mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Amanat ini menjadi tantangan yang semakin besar seiring dengan laju urbanisasi yang pesat di Indonesia, khususnya di Kota Bandar Lampung. Urbanisasi ini memicu alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, yang pada akhirnya meningkatkan ketergantungan kota pada pasokan pangan dari luar wilayah. Ketergantungan yang

tinggi ini membuat masyarakat perkotaan rentan terhadap gejolak harga dan gangguan distribusi, sehingga berisiko mengalami kerawanan pangan (Adetya, 2024).

Urban farming, atau pertanian perkotaan, muncul sebagai respons nyata terhadap keterbatasan lahan dan ancaman kerawanan pangan di perkotaan. Kegiatan ini didefinisikan sebagai bentuk budidaya pertanian dalam pengertian yang luas, yang memanfaatkan lahan sempit dan tidak terpakai, seperti pekarangan rumah, atap bangunan, atau *vertikal garden* (Gea dkk, 2025). Program ini terbukti mampu mengoptimalkan lahan yang ada untuk menghasilkan bahan makanan segar, yang berdampak pada peningkatan ketahanan pangan keluarga sekaligus perbaikan kualitas lingkungan (Natalia dkk, 2025).

Di Kota Bandar Lampung, di mana tekanan pembangunan dan pertumbuhan penduduk terus meningkat, *urban farming* memiliki arti penting sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar wilayah. Pelaksanaannya mencakup berbagai metode yang sesuai dengan kondisi kota, seperti hidroponik dan aquaponik, yang menunjukkan kesiapan kota untuk mengadopsi inovasi pertanian ini (Adetya, 2024). Oleh karena itu, adopsi inovasi dan metode pertanian lahan sempit ini menjadi keharusan, mengingat keterbatasan lahan di perkotaan merupakan tantangan yang menuntut pemanfaatan sumber daya secara efisien demi kemandirian pangan (Afriyanni, G., & Amri, K. 2024). Menanggapi tantangan tersebut, program *urban farming* di Bandar Lampung adalah inisiatif pemerintah kota yang bertujuan untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah-rumah sebagai lahan pertanian (Saputra, 2024).

Berdasarkan hasil pra-riset wawancara pada tanggal 29 Juli 2024 dengan Ari Astiti selaku penyuluh dari dinas pertanian, implementasi *urban farming* ini melibatkan aktor pemerintah (seperti Dinas Pertanian dan BAPPERIDA) serta aktor non-pemerintah yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Komunitas/Yayasan terkait. Untuk mendukung keberhasilannya, pemerintah meluncurkan serangkaian program terstruktur, mulai dari fasilitasi bibit, peningkatan kapasitas individu melalui "Mantap Bu Tani", penguatan kelembagaan lewat "Pelangi Pagiku", hingga mendorong kemandirian melalui model Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya (P4S).

Proses implementasi kebijakan yang melibatkan banyak aktor menuntut adanya sinergi dan koordinasi antarpihak demi menyalurkan sumber daya secara tepat dan memastikan program mencapai tujuannya di tingkat komunitas.

Fenomena implementasi program *urban farming* yang melibatkan banyak pihak dan menuntut sinergi antar-elemen pelaksana menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan pada tahap perumusan, tetapi juga sangat bergantung pada pelaksanaannya di lapangan (Elvaretta dkk, 2024). Karena itu, diperlukan kerangka analisis yang menyeluruh untuk mengkaji dimensi-dimensi penting yang memengaruhi tercapainya tujuan program *urban farming* di Kota Bandar Lampung secara optimal. Untuk menganalisis fenomena implementasi kebijakan *urban farming* ini, penelitian ini secara spesifik menggunakan Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikembangkan oleh Jan Merse (dalam Kadji, 2015).

Menurut Jan Merse (dalam Kadji, 2015) terdapat empat indikator utama yang saling terkait dalam model ini yaitu Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, dan Pembagian Potensi. Model Merse memberikan gambaran bagi peneliti untuk tidak hanya melihat output kebijakan, tetapi juga untuk mengkaji dinamika internal yang memengaruhi pelaksana (Dinas Pertanian) dan penerima manfaat (KWT) dalam proses transisi dari rencana menjadi aksi nyata. Dengan demikian, setiap hambatan yang terjadi di lapangan dapat diidentifikasi secara sistematis berdasarkan dimensi-dimensi fundamental dari implementasi kebijakan.

Penekanan pada dua faktor utama, yakni Informasi (Komunikasi) dan Isi Kebijakan (Substansi), menjadi aspek mendasar dalam pelaksanaan program *urban farming*. Menurut Amelia, S., & Nawangsari, E. R. (2021), faktor informasi berperan penting dalam menentukan efektivitas sosialisasi kepada Kelompok Wanita Tani, di mana pemahaman mengenai teknis budidaya, prosedur operasional, dan sistem pelaporan perlu disampaikan secara terbuka dan berkelanjutan. Apabila kedua faktor tersebut substansi kebijakan yang memadai dan komunikasi yang jelas tidak berjalan dengan baik, maka implementasi program berisiko mengalami salah tafsir, penolakan dari masyarakat, serta menghambat keberlanjutan *urban farming* di tingkat komunitas.

Selain itu, Model Jan Merse juga menyoroti dua faktor penting lainnya, yaitu Dukungan Masyarakat (Partisipasi) dan Pembagian Potensi (Koordinasi Sumber Daya) sebagai penentu keberlanjutan program *urban farming* di Kota Bandar Lampung. Dukungan masyarakat tercermin dari tingkat keterlibatan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program, yang menunjukkan rasa memiliki terhadap inisiatif tersebut. Sementara itu, Pembagian Potensi menggambarkan efektivitas koordinasi antara Dinas Pertanian dan para pemangku kepentingan dalam pendistribusian sumber daya seperti bibit, sarana, dan tenaga penyuluh secara merata dan tepat waktu. Melalui analisis terhadap keempat dimensi dalam model Jan Merse, penelitian ini berupaya mengidentifikasi secara menyeluruh kesenjangan antara kebijakan ideal yang dirumuskan pemerintah dengan realitas implementasi di lapangan.

Meskipun program *urban farming* telah diluncurkan dan didukung pemerintah, implementasinya di lapangan seringkali belum berjalan optimal karena menghadapi kendala teknis dan manajerial. Kajian implementasi kebijakan serupa di Kota Semarang menemukan bahwa faktor-faktor seperti komunikasi yang belum konsisten antar elemen pelaksana, kebutuhan sumber daya seperti media tanam yang belum terpenuhi, hingga struktur organisasi birokrasi dapat menghambat pelaksanaan program (Maulana et al., 2022). Temuan lain di Kota Surabaya juga menegaskan bahwa ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana merupakan unsur penting yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan publik (Wulandari, S., & Tukiman, T. 2023).

Penelitian oleh Islami, Budiarti, & Makalew (2025), di Kota Bogor menunjukkan bahwa keberadaan pertanian perkotaan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal dan meningkatkan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan tepat (Islami, Budiarti, & Makalew, 2025). Lebih lanjut, penelitian mengenai keterlibatan masyarakat di Jakarta Timur menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial menjadi penentu utama dalam keberlanjutan kegiatan *urban farming* (Novia dkk, 2024). Hal ini mempertegas bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di perkotaan tidak hanya ditentukan oleh regulasi pemerintah, tetapi juga oleh respons, partisipasi, dan keberlanjutan dukungan dari kelompok sasaran.

Di sisi lain, kompleksitas implementasi multi-aktor ini menyimpan risiko terjadinya kegagalan kebijakan (*policy failure*) apabila sinkronisasi peran dan komunikasi terhambat di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika kerangka hukum, dukungan teknologi, dan integrasi konsep dalam perencanaan pembangunan lemah, keberlanjutan *urban farming* akan terancam (Pratio dkk, 2024). Adanya potensi tantangan implementasi ini di Kota Bandar Lampung, yang melibatkan Dinas Pertanian dan KWT, menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang ideal dengan realisasi implementasi di lapangan yang sangat dipengaruhi oleh unsur pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menganalisis secara mendalam proses implementasi kebijakan *urban farming* di Kota Bandar Lampung, guna mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tercapainya tujuan program secara optimal. Analisis ini diperlukan untuk menyediakan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan implementasi nyata. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat penelitian skripsi berjudul, “Implementasi *Urban Farming* di Kota Bandar Lampung.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *urban farming* di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja tantangan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan *urban farming*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi *urban farming* di Kota Bandar Lampung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis tantangan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan *urban farming*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka penulis juga merumuskan manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan publik, kolaborasi aktor, dan kebijakan *urban farming*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pemahaman tentang faktor-faktor penentu keberhasilan dan kendala pelaksanaan kebijakan berbasis komunitas di sektor pertanian perkotaan (*Urban Farming*), terutama melalui penerapan Model Implementasi Kebijakan khususnya menurut Jan Merse.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu yang sama di wilayah lain, atau yang ingin mengembangkan lebih lanjut model analisis implementasi kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya, dalam merumuskan dan mengevaluasi strategi implementasi kebijakan *urban farming* secara lebih efektif dan tepat sasaran.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi hambatan dan potensi perbaikan dalam pelaksanaan program *urban farming* di lapangan, sehingga dapat meningkatkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis bagi masyarakat perkotaan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi Kelompok Wanita Tani (KWT), penyuluh pertanian, dan *stakeholder* lokal lainnya dalam memahami peran masing-masing dan memperkuat koordinasi antar aktor untuk mencapai tujuan program secara optimal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam kepada peneliti tentang penelitian yang akan dilakukan ke depannya. Penelitian terdahulu juga menjadi acuan bagi peneliti untuk lebih fokus kepada permasalahan yang dihadapi berdasarkan referensi penelitian lain. Berdasarkan judul penelitian tentang "Implementasi *Urban Farming* di Kota Bandar Lampung", maka peneliti memilih sepuluh jenis penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterbatasan
1	Islami, S. A., Budiarti, T., & Makalew, A. D. N. (2025). Kajian Implementasi dan Manfaat Pertanian Perkotaan pada Kelompok Tani di Kota Bogor. <i>Jurnal Penyuluhan</i> , 21(01), 74-90.	Penerapan pertanian perkotaan di Kota Bogor secara umum dinilai baik oleh kelompok tani, dengan nilai indeks 0,80. Implementasi umumnya dilakukan pada luas lahan yang terbatas, dengan komoditas utama berupa sayuran. Kendala yang dihadapi kelompok tani tergolong sedang (indeks nilai 0,53), namun konsep dasarnya diarahkan untuk optimasi pemanfaatan lahan terbuka dan mendukung ketahanan pangan serta ekonomi rumah tangga.	Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif berdasarkan persepsi (indeks Likert), bukan model implementasi kebijakan yang terstruktur. Belum menganalisis secara mendalam bagaimana faktor Isi Kebijakan dan Pembagian Potensi (Jan Merse) secara simultan merespons kendala regulasi lahan dan pemenuhan sarana di wilayah Bandar Lampung.

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterbatasan
2	SYAHRUL, M. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN URBAN FARMING TERHADAP OPTIMASI PEMANFAATAN RUANG DI KOTA MAGELANG.	Implementasi kebijakan <i>urban farming</i> di Kota Magelang belum berjalan dengan baik, terutama dilihat dari variabel Komunikasi, Sumber Daya, dan Disposisi. Kendala yang muncul meliputi belum tersedianya sumber daya yang merata, minimnya partisipasi masyarakat, dan isu keberlanjutan kebijakan. Peraturan Walikota yang ada belum sepenuhnya berhasil menggerakkan implementasi di lapangan. Pada tahap Komunikasi, penyampaian substansi hukum (Perwal) sudah dilakukan melalui sosialisasi, namun informasi yang diterima masyarakat belum efektif, yang berakibat pada lambatnya implementasi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah telah berupaya merumuskan strategi peningkatan optimasi melalui pelatihan, sosialisasi, monitoring, dan pengembangan program untuk mendorong pembudayaan <i>urban farming</i>.	Penelitian ini berfokus pada pendekatan yuridis empiris dan sistem hukum (Meriam), bukan Model Implementasi Kebijakan (Jan Merse) yang fokus pada input (Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan) dan proses (Pembagian Potensi). Penelitian ini belum menguji secara spesifik bagaimana Dukungan Masyarakat (Non-Fisik) secara partisipatif memengaruhi implementasi di Bandar Lampung.
3	Oktarina, S., Purnaningsih, N., & Hapsari, D. R. (2023). Praktik <i>Urban Farming</i> bagi Wanita Tani untuk Ketahanan Pangan Keluarga di Masa Pandemi. <i>Jurnal Penyuluhan</i> , 19(02), 356-367.	Hasilnya menunjukkan bahwa praktik <i>urban farming</i> marak dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kabupaten Bogor pada masa pandemi untuk menunjang ketahanan pangan keluarga. Keberhasilan didorong oleh inisiatif KWT dalam	Penelitian ini fokus pada aspek pemberdayaan, motivasi, dan praktik KWT di masa pandemi. Belum menguji faktor-faktor implementasi kebijakan publik secara formal, terutama dimensi Isi Kebijakan dan Informasi

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterbatasan
		memanfaatkan pekarangan secara optimal dan kesadaran internal akan pentingnya sayuran sehat. Dampak utama praktik <i>urban farming</i> adalah menumbuhkan kesadaran pentingnya sayuran sehat, optimalisasi lahan, dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Peran KWT sangat sentral sebagai agen penyebar informasi dan pelaksana teknis di tingkat akar rumput (aspek Dukungan Masyarakat Non-Fisik), menunjukkan pentingnya aktor kunci di luar pemerintah.	kebijakan dari perspektif Jan Merse sebagai kerangka utama, yang diperlukan untuk konteks Bandar Lampung.
4	Maulana, R. A., Warsono, H., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). <i>Urban farming: Program pemanfaatan lingkungan untuk pengembangan pertanian perkotaan di Kota Semarang. Perspektif</i> , 11(4), 1329-1335.	Penelitian ini menemukan bahwa implementasi belum berjalan dengan baik dan belum optimal. Program belum mencapai aspek kesesuaian antara pelaksana dan pengguna, mengindikasikan adanya inkonsistensi pada dimensi Komunikasi dan Disposisi pelaksana di lapangan. <i>urban farming</i> bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan keterampilan masyarakat, dan sebagai strategi ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan. Namun, tujuan tersebut belum tercapai secara optimal karena masalah Sumber Daya yang kurang merata dan inkonsistensi informasi yang disalurkan.	Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang cenderung hanya mendeskripsikan kendala. Belum menguji secara terstruktur dimensi Isi Kebijakan (kejelasan prosedur) dan Dukungan Masyarakat (Fisik). Model Jan Merse dengan fokus pada Pembagian Potensi sangat dibutuhkan untuk membedah kendala sumber daya di Bandar Lampung.

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterbatasan
5	Zulfatunasuroh (2022) berjudul, Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan <i>Urban Farming</i> Melalui Kelompok Wanita Tani Cempaka Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara.	Mengkaji bentuk dan tahapan partisipasi masyarakat dalam kegiatan <i>urban farming</i> yang diinisiasi oleh KWT Cempaka. Menggunakan teori partisipasi dari Keith Davis dan Yadav, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terwujud dalam berbagai bentuk, meliputi sumbangan pikiran, tenaga, keahlian, barang, dan uang. Proses partisipasi ini berlangsung dalam empat tahapan, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil.	Penelitian ini fokus pada Model Partisipasi Masyarakat dan komunikasi dalam konteks <i>Community Development</i> . Belum menganalisis faktor Isi Kebijakan (kejelasan prosedur) dan Pembagian Potensi (ketersediaan anggaran/sarana pemerintah) secara formal melalui kerangka Model Jan Merse di Bandar Lampung.
6	Fajarah, I., Murdiyanto, E., & Budiarto, B. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui <i>Urban Farming</i> Oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. <i>Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi</i> , 23(1), 57-71.	Implementasi <i>urban farming</i> sukses didukung oleh proses Pemberdayaan Masyarakat yang sistematis. Prosesnya dimulai dengan perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat, tokoh, dan KWT. Hal ini sangat penting dalam membangun modal sosial dan memastikan program selaras dengan kebutuhan lokal (aspek Dukungan Masyarakat Non-Fisik). Tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan yang sistematis berkontribusi besar pada kemandirian masyarakat dan keberlanjutan program, yang merupakan inti dari keberhasilan implementasi.	Penelitian ini fokus pada proses Pemberdayaan dan Peran Aktor. Meskipun menyentuh aspek partisipasi, penelitian ini tidak menggunakan model implementasi kebijakan publik seperti Jan Merse. Keterbatasan ada pada minimnya analisis formal terhadap faktor Informasi dan Isi Kebijakan yang menjadi input dalam kerangka implementasi di Bandar Lampung.
7	Siti Ainun Rahman (2018) berjudul, Implementasi	Implementasi program <i>urban farming</i> di Makassar bertujuan	Penelitian ini fokus pada aspek tata ruang dan lingkungan

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterbatasan
	Program <i>Urban Farming</i> di Kawasan Permukiman dalam Peningkatan Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.	utama untuk peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan persentase lahan hijau di kawasan permukiman. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan RTH di beberapa titik pilot <i>project</i> , namun implementasi ini sangat bergantung pada komitmen kepala daerah dan dukungan anggaran. Ditemukan bahwa peran serta masyarakat (aspek Dukungan Masyarakat Non-Fisik) adalah kunci utama dalam pemeliharaan RTH yang dibentuk melalui <i>urban farming</i> . Namun, keberlanjutan program ini masih dipertanyakan setelah bantuan sarana fisik awal telah habis, mengindikasikan kelemahan pada Pembagian Potensi jangka panjang.	hidup. Keterbatasannya adalah tidak menganalisis fenomena implementasi kebijakan dari sudut pandang administrasi publik, melainkan agribisnis dan environmental management.
8	Amelia, S., & Nawangsari, E. R. (2021). Implementasi Program “ <i>Urban Farming</i> ” Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya). <i>Jurnal Governansi</i> , 7(2), 121-130.	Implementasi program <i>urban farming</i> di Kelurahan Jeruk, Surabaya, berhasil karena didukung oleh Tujuan dan Standar Kebijakan yang jelas serta Disposisi Pelaksana yang tinggi dan responsif di tengah krisis pandemi. Model Van Meter dan Van Horn digunakan untuk menganalisis keberhasilan ini. Kualitas hubungan antarorganisasi yang baik (koordinasi cepat antar Dinas) menjadi faktor penting yang mempercepat Pembagian Potensi sumber daya. Kejelasan Tujuan Kebijakan (aspek Isi	Penelitian menggunakan Model Van Meter dan Van Horn, yang berbeda dengan Jan Merse. Model tersebut belum secara eksplisit memisahkan faktor Isi Kebijakan dari Tujuan dan Standar atau membedah secara rinci aspek Pembagian Potensi yang berkelanjutan (Jan Merse). Analisis model Jan Merse diperlukan untuk menguji konteks Bandar Lampung.

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterbatasan
		Kebijakan) juga memudahkan pelaksana dalam menentukan prioritas tindakan dan penyebaran Informasi kepada masyarakat secara sederhana.	
9	Setyaningrum, S. D., Ati, N. U., & Suyeno, S. (2021). Implementasi Program <i>Urban Farming</i> Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Perkotaan (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang). <i>Respon Publik</i> , 15(4), 75-82.	Pelaksanaan program <i>urban farming</i> di Kota Malang bertujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, meningkatkan ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Program ini juga berhasil memotivasi masyarakat untuk membentuk kelompok pertanian agar menjadi lebih mandiri dan maju.	Penelitian ini merupakan studi kasus di Malang dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup. Belum membedah secara komprehensif faktor Dukungan Masyarakat (Fisik) terkait isu lahan dan Pembagian Potensi (pendanaan berkelanjutan) yang menjadi masalah krusial di Bandar Lampung.
		Masalah pergeseran lahan pertanian akibat pembangunan infrastruktur menjadi latar belakang utama perlunya program <i>urban farming</i> . Faktor pendukung dan penghambat menjadi fokus, dengan penekanan pada penyediaan sarana dan prasarana (aspek Pembagian Potensi) yang memadai agar program dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.	
10	Suryani, S., Nurjasmi, R., & Fitri, R. (2020). Pemanfaatan lahan sempit perkotaan untuk kemandirian pangan keluarga. <i>Jurnal Ilmiah Respati</i> , 11(2), 93-102.	Penelitian ini mendeskripsikan pentingnya pemanfaatan lahan terbatas (pekarangan) untuk pertanian, yang bertujuan mewujudkan kemandirian pangan keluarga. Praktik <i>urban farming</i> yang dikembangkan saat ini	Penelitian ini sangat fokus pada aspek teknis budidaya dan pemanfaatan lahan. Keterbatasannya adalah tidak menganalisis fenomena implementasi kebijakan dari sudut pandang administrasi

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterbatasan
		terbatas pada sayuran, hortikultura, tanaman hias, dan tanaman obat yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan.	publik, melainkan agroteknologi. Oleh karena itu, faktor Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, dan Pembagian
		Ditekankan bahwa perubahan penggunaan lahan perkotaan memerlukan kebijakan pengendalian untuk mewujudkan kemandirian pangan. Metode budidaya seperti vertikultur sangat efektif untuk lahan sempit, namun keberhasilannya sangat bergantung pada penyediaan Informasi yang tepat dan Pembagian Potensi berupa bantuan sarana fisik yang memadai di awal program.	Potensi (Jan Merse) belum teruji dalam konteks kebijakan Bandar Lampung.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai Kegiatan *urban farming* di Indonesia telah diterapkan secara luas dengan berbagai tujuan dan pendekatan, seperti dampak terhadap ketahanan pangan, pemanfaatan lahan sempit, peran Kelompok Wanita Tani, dan aspek tata ruang. Sebagian besar penelitian berhasil menunjukkan bahwa *urban farming* memiliki potensi besar dalam meningkatkan ketahanan pangan, ekonomi rumah tangga, dan kesadaran lingkungan. Namun, kajian-kajian tersebut memiliki kecenderungan untuk berfokus pada level komunitas/operasional (*bottom-up*) dan analisis teknis deskriptif, alih-alih pada bagaimana Pemerintah Daerah mengimplementasikan kebijakan secara kelembagaan dan berkelanjutan.

Meskipun beberapa penelitian telah menggunakan model formal seperti Van Meter dan Van Horn hasilnya masih belum mampu sepenuhnya menggambarkan kerumitan persoalan keberlanjutan. Masalah mendasar seperti ketimpangan sumber

daya atau pembagian potensi, serta lemahnya regulasi atau isi kebijakan, terus muncul sebagai hambatan utama. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara perencanaan di tingkat atas dan kondisi riil pelaksana di lapangan. Akibatnya, analisis yang digunakan dalam penelitian sebelumnya belum mampu menggabungkan seluruh dimensi implementasi kebijakan publik secara terpadu.

Kondisi tersebut secara jelas mengarahkan pada adanya Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*) yang mendesak, terutama dalam aspek teoritis dan empiris. Secara teoretis, ditemukan ketidakpaduan dalam analisis implementasi Model implementasi klasik yang digunakan peneliti terdahulu (seperti di Semarang, Surabaya, atau Magelang) terbukti tidak memadai untuk menyatukan masalah regulasi (Isi Kebijakan) dengan masalah alokasi sumber daya yang berkelanjutan (Pembagian Potensi). Model-model tersebut cenderung memisahkan empat pilar implementasi sehingga gagal merumuskan rekomendasi yang terintegrasi. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dan kontribusi teoretis penelitian ini adalah menguji efektivitas Model Implementasi Kebijakan Jan Merse yang bersifat menyeluruh. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam (*in-depth*) bagaimana setiap pilar Jan Merse berinteraksi misalnya, apakah kejelasan Isi Kebijakan menjamin konsistensi Pembagian Potensi sehingga menghasilkan gambaran implementasi yang komprehensif.

Selain itu, terdapat kekosongan empiris yang signifikan pada konteks lokasi. Riset terdahulu terpusat di kota-kota besar di Jawa dan Makassar, sementara studi implementasi kebijakan *urban farming* secara spesifik dan mendalam di Kota Bandar Lampung masih sangat minim ditemukan dalam literatur ilmiah. Sebagai Ibu Kota Provinsi, Bandar Lampung memiliki dinamika urbanisasi dan tekanan alih fungsi lahan yang unik, sehingga masalah Dukungan Masyarakat Fisik (lahan) menjadi sangat penting. Kekosongan data ini menjadikan penelitian ini sangat urgen. Riset ini akan mengisi celah tersebut dengan menelaah bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons isu tersebut melalui Isi Kebijakan dan bagaimana Pembagian Potensi dialokasikan secara adaptif untuk karakteristik wilayah setempat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Menurut Thomas (1981, dalam Subianto, A. 2020), kebijakan publik dipahami sebagai segala bentuk pilihan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya, baik pilihan tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata maupun dalam bentuk keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Pemaknaan ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak selalu harus hadir dalam bentuk program, proyek, atau kegiatan yang tampak secara langsung di hadapan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan juga dapat tercermin melalui sikap diam, pembiaran, atau keputusan pemerintah untuk tidak melakukan intervensi terhadap suatu persoalan publik tertentu. Dengan kata lain, absennya tindakan pemerintah dalam menghadapi suatu isu juga merupakan hasil dari sebuah keputusan kebijakan yang memiliki konsekuensi tersendiri bagi masyarakat.

Dengan demikian, setiap langkah yang diambil oleh pemerintah, baik secara eksplisit melalui penetapan peraturan perundang-undangan, penyusunan program, maupun secara implisit melalui ketidakhadiran intervensi, tetap dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pilihan, baik untuk bertindak maupun untuk tidak bertindak.

Setiap alternatif tersebut dipilih berdasarkan kepentingan, nilai, serta pertimbangan strategis tertentu yang diyakini paling sesuai dalam menghadapi persoalan publik yang ada. Sejalan dengan pandangan tersebut, Peters, B. Guy (2015) menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup keseluruhan aktivitas pemerintah, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh lembaga pemerintah maupun yang dilaksanakan melalui perantara atau pihak lain, selama aktivitas tersebut memiliki pengaruh nyata terhadap kehidupan masyarakat (Subianto, A. 2020). Dengan demikian, fokus kebijakan publik tidak semata-mata terletak pada siapa pelaksananya, tetapi pada dampak yang dihasilkan terhadap kepentingan publik.

Sementara itu, menurut James E. Anderson, kebijakan dapat dipahami sebagai suatu rangkaian tindakan yang bersifat relatif konsisten, berkesinambungan, dan berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu. Rangkaian tindakan tersebut dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam rangka menghadapi, menangani, atau menyelesaikan suatu persoalan atau isu yang dianggap penting dan strategis. Dalam pengertian ini, kebijakan publik merupakan kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh lembaga serta pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan formal berdasarkan sistem politik dan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, Anderson juga mengakui bahwa proses kebijakan publik tidak sepenuhnya bersifat eksklusif milik pemerintah, karena aktor dan faktor non-pemerintah dapat memberikan pengaruh yang signifikan, baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun dalam proses implementasi dan evaluasinya. Karakteristik utama kebijakan publik terletak pada fakta bahwa kebijakan tersebut ditetapkan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan legitimasi dalam sistem politik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh David Easton, yang menyebutkan bahwa aktor-aktor kebijakan mencakup para pemimpin tertinggi negara, eksekutif, legislator, hakim, administrator, anggota dewan, raja, maupun pejabat sejenis lainnya yang memiliki kewenangan formal untuk membuat keputusan yang bersifat mengikat dan berdampak luas bagi masyarakat (Suaib, H., dkk., 2022).

Oleh karena itu, kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan dan proses politik yang melingkupinya. Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil, atau bahkan tidak diambil, oleh pemerintah yang memiliki otoritas, dengan tujuan tertentu untuk mengatasi persoalan atau isu yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Kebijakan publik tidak hanya terbatas pada tindakan langsung pemerintah melalui regulasi atau pelaksanaan program tertentu, tetapi juga mencakup aktivitas yang dilaksanakan melalui pihak lain dengan tetap berada dalam kendali, arahan, atau pengawasan pemerintah.

Selain itu, kebijakan publik juga mengakui adanya peran serta dan pengaruh aktor non-pemerintah dalam keseluruhan proses kebijakan, mulai dari tahap perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Pada intinya, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat, mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembangunan. Dalam konteks penelitian ini, program *urban farming* di Kota Bandar Lampung dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari sebuah kebijakan publik sebagaimana dijabarkan oleh para ahli tersebut.

Program *urban farming* ini lahir sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang memiliki tujuan spesifik dan terarah, sebagaimana dikemukakan oleh James E. Anderson, yaitu untuk merespons persoalan publik yang krusial berupa penyusutan lahan produktif dan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat tekanan urbanisasi yang terus meningkat di Kota Bandar Lampung. Kehadiran kebijakan ini mencerminkan adanya pilihan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk bertindak secara aktif, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas R. Dye, dalam menghadapi ancaman terhadap ketahanan pangan perkotaan sekaligus penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakat kota.

Lebih lanjut, keberhasilan implementasi kebijakan *urban farming* tersebut tidak mungkin sepenuhnya bergantung pada peran pemerintah semata. Pelaksanaan program *urban farming* di Kota Bandar Lampung menuntut adanya kolaborasi, koordinasi, serta pelibatan aktif dari berbagai pihak non-pemerintah, seperti Kelompok Wanita Tani (KWT), kalangan akademisi, komunitas masyarakat, serta sektor swasta. Kebutuhan akan kerja sama dan sinergi antaraktor ini sejalan dengan pandangan Peters dan Anderson yang menegaskan bahwa aktivitas pemerintah dalam kebijakan publik dapat, dan bahkan dalam banyak kasus perlu, dilaksanakan melalui pihak lain guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan.

Oleh karena itu, program *urban farming* di Kota Bandar Lampung tidak dapat dipandang semata-mata sebagai program teknis di bidang pertanian perkotaan. Program ini harus dipahami sebagai instrumen kebijakan publik yang bersifat kompleks, multidimensional, dan lintas sektor, karena melibatkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan. Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh bagaimana proses implementasi dijalankan di tingkat lapangan, sejauh mana kolaborasi antaraktor dapat dibangun secara berkelanjutan, serta bagaimana keberlanjutan program dikelola secara efektif agar mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan perkotaan.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edwards (1980) dalam Septiana, A. R., dkk. (2023), implementasi kebijakan publik memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan karena kebijakan publik yang telah dirumuskan secara baik, sistematis, dan rasional pada tahap perencanaan tidak akan mampu menghasilkan dampak yang optimal apabila tidak disertai dengan proses pelaksanaan yang tepat, konsisten, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya di atas kertas, tetapi juga sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dan dijalankan oleh para pelaksana di lapangan.

Edwards menekankan bahwa kegagalan kebijakan sering kali bukan disebabkan oleh kelemahan substansi kebijakan itu sendiri, melainkan oleh lemahnya proses implementasi. Oleh karena itu, implementasi menjadi tahap yang sangat menentukan karena pada tahap inilah kebijakan berhadapan langsung dengan realitas sosial, administratif, dan politik yang kompleks. Sebaliknya, kebijakan yang secara substansi masih memiliki keterbatasan atau kekurangan tertentu tetap memiliki peluang untuk berjalan secara efektif apabila proses implementasinya dilakukan dengan baik, konsisten, terarah, dan adaptif terhadap kondisi lapangan.

Lebih lanjut, Edwards menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh empat variabel utama yang saling berkaitan serta harus dikelola secara simultan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana atau disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel komunikasi berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh para pelaksana, sedangkan sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan, dan struktur birokrasi menyangkut pola organisasi serta mekanisme kerja yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Keempat variabel tersebut menjadi fondasi dasar yang sangat penting dalam menganalisis dan memahami tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan publik.

Pandangan mengenai pentingnya implementasi kebijakan juga diperkuat oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975, dalam Subianto, A. 2020) yang memandang implementasi sebagai suatu upaya strategis untuk mewujudkan perubahan nyata sebagaimana diharapkan dalam sebuah kebijakan. Mereka mengaitkan secara erat antara isu kebijakan yang tercermin dalam isi dan tujuan kebijakan, proses implementasi yang berlangsung di lapangan, serta kinerja atau *performance* yang dihasilkan sebagai *output* dari kebijakan tersebut. Dalam perspektif ini, implementasi tidak dipahami sebagai sekadar tahap administratif, melainkan sebagai jembatan utama antara perumusan kebijakan dan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan mampu menciptakan perubahan yang sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Selain itu, mekanisme pengendalian atau kontrol yang diterapkan selama proses implementasi serta tingkat kepatuhan para aktor pelaksana terhadap ketentuan dan arah kebijakan juga menjadi faktor penentu utama. Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari aspek pengawasan, koordinasi, serta komitmen para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sementara itu, Merilee S. Grindle (1980, dalam Subianto, A. 2020) memperluas pemahaman mengenai implementasi kebijakan dengan menyoroti dimensi politis dan sosial yang melekat di dalamnya. Grindle menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak berlangsung dalam ruang yang netral dan steril dari kepentingan, melainkan dipengaruhi oleh dinamika politik, potensi konflik antaraktor, proses pengambilan keputusan, serta pembagian manfaat atau *benefit* yang dihasilkan dari suatu kebijakan. Dalam pandangan ini, implementasi kebijakan dipahami sebagai proses interaksi yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, kekuatan, dan posisi yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola konflik, membangun konsensus, serta mendistribusikan manfaat kebijakan secara adil dan proporsional kepada kelompok sasaran. Apabila proses ini tidak dikelola dengan baik, maka kebijakan berpotensi menghadapi resistensi, penolakan, atau bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga sarat dengan muatan sosial dan politik.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, berlapis, dan bersifat multidimensional. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal birokrasi, seperti ketersediaan sumber daya, efektivitas komunikasi, sikap pelaksana, serta struktur organisasi, sekaligus dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mencakup kejelasan substansi kebijakan, dinamika sosial masyarakat, serta kepentingan para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sangat ditentukan oleh keterlibatan, dukungan, dan respons lingkungan sosial tempat kebijakan tersebut diterapkan.

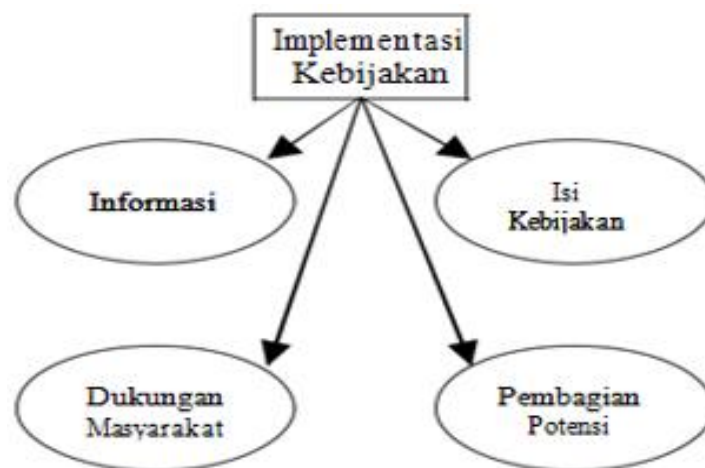
Dalam konteks implementasi *urban farming* di Kota Bandar Lampung, keberhasilan program sangat bergantung pada adanya kolaborasi aktif, sinergis, dan berkelanjutan antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, komunitas lokal, kelompok masyarakat, hingga sektor swasta. Kolaborasi ini menjadi sangat esensial untuk memastikan bahwa kebijakan *urban farming* tidak hanya berjalan sesuai dengan prosedur administratif semata, tetapi juga benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Manfaat tersebut antara lain berupa peningkatan ketahanan pangan perkotaan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penguatan kualitas lingkungan hidup di wilayah perkotaan.

Oleh karena itu, untuk menganalisis kompleksitas implementasi kebijakan yang bersifat multidimensi tersebut, penelitian ini menggunakan Model Implementasi Kebijakan Jan Merse sebagai kerangka analisis utama. Model ini dinilai relevan karena secara eksplisit mengelompokkan dan merinci faktor-faktor implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli klasik ke dalam empat dimensi spesifik yang saling terintegrasi dan saling memengaruhi.

Faktor komunikasi yang dikemukakan oleh Edwards serta isu karakteristik kebijakan dari Van Meter dan Van Horn ditransformasikan ke dalam dimensi informasi dan isi kebijakan. Sementara itu, faktor sumber daya dari Edwards dan aspek pembagian manfaat yang disoroti oleh Grindle diakomodasi dalam dimensi pembagian potensi serta dukungan masyarakat dalam kerangka Jan Merse. Dengan demikian, Model Jan Merse tidak meniadakan atau mengesampingkan teori-teori klasik implementasi kebijakan, melainkan menjadikannya sebagai landasan konseptual untuk membangun kerangka operasional yang lebih tajam, sistematis, dan fokus dalam menganalisis implementasi *urban farming* di Kota Bandar Lampung secara komprehensif dan berkelanjutan.

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Jan Merse (dalam Kadji, 2015), terdapat empat faktor utama yang secara signifikan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini mencakup dimensi komunikasi, substantif kebijakan, dukungan sosial, dan koordinasi struktural. Keempat faktor tersebut memberikan landasan yang kokoh untuk mengukur sejauh mana kebijakan *urban farming* dapat mencapai tujuannya di tingkat komunitas, yaitu:



**Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Jan Merse
(dalam Kadji, 2015)**

Sumber: Kadji, Y. (2015).

1. Informasi (Komunikasi)

Informasi merupakan elemen krusial yang menentukan kejelasan dan pemahaman program di antara semua pihak yang terlibat. Dalam implementasi kebijakan, minimnya informasi atau adanya disorientasi komunikasi dapat menghambat pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Merse menegaskan bahwa informasi yang memadai merujuk pada adanya keterbukaan dan kejelasan komunikasi mengenai tujuan, prosedur, dan manfaat kebijakan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran. Dalam konteks *urban farming*, indikator ini akan menyoroti seberapa efektif program dilakukan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat penerima manfaat, termasuk kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan dan pelaporan.

2. Isi Kebijakan (Substansi)

Isi kebijakan merujuk pada substansi, tujuan, dan sasaran spesifik yang ingin dicapai oleh program. Faktor ini sangat memengaruhi seberapa besar manfaat dan dampak positif kebijakan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Merse menekankan bahwa isi kebijakan harus jelas dan tegas agar dapat menjadi acuan utama yang konsisten dalam proses implementasi. Untuk program *urban farming*, fokus analisis adalah pada kejelasan tujuan kebijakan (misalnya peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, atau konservasi lingkungan) dan apakah substansi program sudah secara akurat dan tepat menyasar kebutuhan spesifik masyarakat Kota Bandar Lampung.

3. Dukungan Masyarakat (Partisipasi)

Dukungan masyarakat berkaitan erat dengan tingkat partisipasi aktif komunitas sebagai *stakeholder* penting dalam seluruh siklus kebijakan. Implementasi kebijakan akan sulit berhasil tanpa adanya dukungan fisik maupun non-fisik yang nyata dari kelompok sasaran. Merse secara spesifik mengaitkan faktor ini dengan partisipasi masyarakat dalam menentukan, menjalankan, dan mengawasi upaya kebijakan pemerintah. Kaitan dengan penelitian ini adalah tingkat keterlibatan masyarakat (terutama KWT) dalam kegiatan *urban farming*, mulai dari pengambilan keputusan awal hingga keberlanjutan program, yang menandakan kepemilikan dan keberlanjutan inisiatif.

4. Pembagian Potensi (Koordinasi)

Pembagian potensi merujuk pada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci dan intensif antar aktor pelaksana, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Merse menekankan bahwa koordinasi antar-organisasi menjadi sentral karena setiap peserta memiliki kepentingan dan latar belakang yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik temu bagi keberhasilan implementasi. Dalam program *urban farming*, faktor ini akan mengukur seberapa baik dinas terkait berkoordinasi dengan *stakeholder* lain (misalnya kecamatan, kelurahan, atau komunitas) dalam mengalokasikan sumber daya, membagi peran, dan mengatasi hambatan teknis di lapangan.

2.3 Konsep *Urban Farming*

2.3.1 Pengertian *Urban Farming*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *urban* diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kota, memiliki ciri kekotaan, atau merujuk pada individu maupun kelompok penduduk yang melakukan migrasi dari wilayah desa ke wilayah kota. Pengertian ini menunjukkan bahwa *urban* tidak hanya berkaitan dengan lokasi geografis, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di lingkungan perkotaan. Secara etimologis, kata *urban* merupakan bentuk kata sifat yang berasal dari istilah *city* yang berarti kota.

Istilah *city* sendiri menggambarkan suatu wilayah yang secara fisik telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang relatif memadai, memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, serta menunjukkan adanya spesialisasi atau zonasi fungsi wilayah yang jelas, seperti kawasan permukiman, perdagangan, industri, dan pelayanan publik. Sementara itu, istilah *urban* lebih menekankan pada karakter atau sifat perkotaan, yaitu proses perkembangan kota yang melibatkan seluruh unsur di dalamnya, mulai dari penduduk, aktivitas ekonomi, tata ruang, hingga pola kehidupan sosial masyarakatnya.

Kawasan *urban* didefinisikan sebagai suatu wilayah yang aktivitas utamanya berada di luar sektor pertanian, dengan fungsi kawasan yang mencakup pusat permukiman, pusat pelayanan sosial, pusat serta distribusi jasa pemerintahan, dan beragam kegiatan ekonomi non-pertanian. Kawasan ini umumnya menjadi pusat pertumbuhan wilayah karena tingginya intensitas aktivitas dan interaksi antarpenduduk. Sebaliknya, kawasan perdesaan atau *rural* lebih berorientasi pada aktivitas pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, dengan fungsi yang meliputi permukiman desa, pemerintahan desa, pelayanan sosial, jasa, serta kegiatan ekonomi yang sebagian besar berbasis pada sektor primer.

Suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai daerah *urban* apabila memenuhi sejumlah kriteria tertentu, antara lain memiliki kepadatan penduduk minimal 5.000 jiwa per kilometer persegi, jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian tidak lebih dari 25%, serta didukung oleh sedikitnya delapan jenis

fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan fasilitas pelayanan lainnya (Kementerian Keuangan, 2011 dalam Sitawati dkk., 2019). Kriteria ini menunjukkan bahwa kawasan *urban* memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dibandingkan wilayah perdesaan.

Menurut Wijaya dan Karto (2020), *urban farming* merupakan suatu konsep bercocok tanam yang diterapkan di wilayah perkotaan maupun di kawasan pinggiran kota dengan memanfaatkan teknik-teknik khusus yang disesuaikan dengan keterbatasan lahan. Konsep *urban farming* muncul sebagai respon terhadap semakin menyempitnya lahan pertanian di kota-kota besar akibat pesatnya pembangunan fisik dan pertumbuhan penduduk. Dalam pengertian yang luas, *urban farming* dipahami sebagai aktivitas budidaya pertanian yang mencakup berbagai subsektor, seperti pertanian tanaman, perikanan, dan peternakan yang terintegrasi dalam satu sistem atau dikenal sebagai *integrated farming*.

Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, *urban farming* hanya merujuk pada kegiatan pertanian tanaman atau *agriculture farming*. Praktik ini berkembang sebagai salah satu alternatif strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat perkotaan secara mandiri dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Septya dan Fanny (2021) menambahkan bahwa *urban farming* dapat diterapkan pada lahan yang sangat terbatas melalui penggunaan *polybag* maupun penerapan teknik *vertikultur*, sehingga memungkinkan masyarakat kota untuk tetap melakukan kegiatan bercocok tanam meskipun memiliki keterbatasan ruang.

Selanjutnya, menurut Annisya, N. W. (2015) dalam Ainun Rahman, Siti (2018), *urban farming* dipahami sebagai kegiatan pertanian yang dilakukan di dalam maupun di sekitar kawasan perkotaan dengan memanfaatkan keterampilan, keahlian, serta inovasi dalam proses budidaya dan pengolahan pangan yang ditujukan bagi masyarakat. Kegiatan ini umumnya memanfaatkan pekarangan rumah, halaman bangunan, maupun lahan kosong yang belum termanfaatkan secara optimal. Melalui *urban farming*, masyarakat diharapkan dapat

meningkatkan asupan gizi keluarga, memperkuat kondisi ekonomi rumah tangga, serta mendukung peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Selain itu, *urban farming* juga diarahkan untuk membentuk dan mengembangkan kelompok-kelompok pertanian di perkotaan yang mampu menumbuhkan kemandirian, kerja sama, serta kemajuan bersama di antara anggotanya. Wijaya, K. dkk. (2020) menjelaskan bahwa *urban farming* memiliki kontribusi yang signifikan terhadap upaya pelestarian lingkungan perkotaan, terutama melalui pemanfaatan sampah organik yang jumlahnya cukup besar di wilayah kota. Dalam praktiknya, *urban farming* mendukung terciptanya lingkungan kota yang lebih bersih dan sehat dengan menerapkan prinsip *reuse, reduce, recycle*.

Dalam konteks ini, *urban farming* berfungsi sebagai wadah pemanfaatan pupuk kompos yang berasal dari pengolahan sampah organik rumah tangga, sehingga mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Program *urban farming* dinilai sangat relevan untuk dijadikan salah satu solusi dalam mewujudkan kota berkelanjutan atau *sustainable city*, karena model ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang dimiliki secara lebih optimal, produktif, dan ramah lingkungan, sekaligus mendukung ketahanan pangan serta kualitas hidup masyarakat perkotaan.

2.3.2 Urgensi dan Peranan *Urban Farming*

Arus urbanisasi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun telah membawa berbagai konsekuensi bagi wilayah perkotaan, terutama terkait dengan ketersediaan pangan dan kualitas lingkungan hidup. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat di kota-kota besar sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan sistem pangan dan lingkungan perkotaan dalam memenuhi kebutuhan secara seimbang dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan kota semakin bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain, baik wilayah perdesaan maupun kawasan di luar kota, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi harga pangan. Ketergantungan tersebut umumnya lebih terasa di negara-negara berkembang, di mana kota berperan sebagai pusat pemukiman sekaligus menjadi titik temu

berbagai latar belakang etnis, sosial, dan ekonomi penduduk dengan kebutuhan konsumsi yang semakin beragam (Ainun Rahman, Siti, 2018).

Dalam konteks tersebut, kehadiran pertanian di kawasan perkotaan atau *urban farming* menjadi salah satu alternatif solusi yang memiliki peranan strategis. *Urban farming* tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat perkotaan, tetapi juga memberikan nilai praktis yang berkontribusi terhadap keberlanjutan ekologi dan ekonomi kota secara keseluruhan. Apabila praktik *urban farming* dikembangkan dengan memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, maka kegiatan ini dapat menghasilkan berbagai keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang.

Nilai positif *urban farming* dapat ditinjau dari berbagai dimensi, antara lain dimensi ekonomi melalui penghematan pengeluaran rumah tangga dan potensi peningkatan pendapatan, dimensi ekologi melalui perbaikan kualitas lingkungan, dimensi sosial melalui penguatan interaksi masyarakat, dimensi estetika melalui penataan ruang yang lebih hijau, dimensi edukasi sebagai sarana pembelajaran lingkungan, hingga dimensi pariwisata yang memberikan daya tarik tersendiri bagi kota (Ainun Rahman, Siti, 2018).

Bagi masyarakat perkotaan, pertanian dapat dimanfaatkan sebagai sarana optimalisasi lahan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia secara terbatas dengan dukungan teknologi tepat guna. Melalui penerapan teknologi sederhana namun efektif, *urban farming* dapat dikembangkan di berbagai ruang, seperti pekarangan rumah, atap bangunan, halaman fasilitas umum, maupun lahan-lahan sempit yang sebelumnya kurang produktif. Pengembangan *urban farming* yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan juga mampu memberikan manfaat tambahan, tidak hanya dari sisi ketersediaan pangan, tetapi juga dari segi kesehatan masyarakat melalui konsumsi pangan segar, dari sisi edukasi melalui peningkatan pengetahuan tentang lingkungan, serta dari sisi wisata melalui penciptaan ruang-ruang edukatif dan rekreatif berbasis pertanian (Ainun Rahman, Siti, 2018).

Di sisi lain, kepadatan bangunan di wilayah perkotaan yang semakin tinggi sering kali membatasi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), sehingga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Berkurangnya RTH dapat menyebabkan meningkatnya suhu udara, menurunnya kualitas udara, serta berkurangnya daya dukung lingkungan kota. Dalam kondisi ini, kehadiran pertanian perkotaan melalui *urban farming* memiliki peranan penting dalam memperluas dan menambah fungsi RTH. Aktivitas pertanian di perkotaan mampu meningkatkan area penyerap CO_2 , membantu memperbaiki sirkulasi udara, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat.

Selain fungsi ekologis, pengembangan *urban farming* juga memiliki nilai edukatif yang signifikan karena mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. RTH yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian perkotaan tidak hanya berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dan tempat rekreasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan lingkungan kota. Lebih jauh, pertanian perkotaan menawarkan daya tarik wisata tersendiri, terutama di tengah keterbatasan RTH dan semakin jaranginya praktik pertanian di kawasan perkotaan. Kondisi ini menjadikan *urban farming* sebagai sarana rekreasi sekaligus edukasi yang bermanfaat, khususnya bagi anak-anak, untuk mengenal proses produksi pangan, mencintai lingkungan, serta memahami pentingnya keseimbangan antara pembangunan kota dan kelestarian alam (Ainun Rahman, Siti, 2018).

2.3.3 Jenis-Jenis *Urban Farming* (Pertanian Perkotaan)

Menurut Haryuni, H., dkk. (2021), *urban farming* memiliki beragam jenis dan metode penerapan yang dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan perkotaan, khususnya keterbatasan lahan, ketersediaan sumber daya, serta kebutuhan masyarakat. Berbagai jenis *urban farming* tersebut dikembangkan sebagai bentuk adaptasi pertanian terhadap ruang kota yang sempit, padat

penduduk, dan memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah perdesaan. Adapun jenis-jenis *urban farming* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Vertikultur merupakan metode bercocok tanam yang dilakukan dengan cara menempatkan tanaman di dalam wadah yang disusun secara vertikal atau bertingkat ke atas. Sistem ini berkembang sebagai solusi atas keterbatasan lahan yang umum dijumpai di kawasan perkotaan. Tanaman dapat ditempatkan dalam berbagai media, seperti pipa paralon, rak bertingkat, maupun botol bekas yang disusun secara vertikal sehingga pemanfaatan ruang menjadi lebih optimal. Media tanam yang digunakan umumnya berupa tanah atau campuran tanah dengan kompos agar kebutuhan hara tanaman tetap terpenuhi. Keunggulan vertikultur terletak pada efisiensi penggunaan ruang, kemampuan menanam lebih banyak tanaman dalam area yang sempit, serta kontribusinya dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan asri. Jenis tanaman yang sering dibudidayakan melalui sistem ini antara lain sayuran daun seperti sawi, kangkung, bayam, selada, serta berbagai tanaman herbal sederhana yang mudah dirawat.
2. *Hidroponik* merupakan teknik budidaya tanaman yang dilakukan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam, melainkan memanfaatkan larutan nutrisi yang mengandung unsur mineral penting bagi pertumbuhan tanaman. Sebagai pengganti tanah, digunakan media tanam alternatif seperti sabut kelapa, serat mineral (*rockwool*), pasir, serbuk kayu, atau pecahan batu bata yang berfungsi menopang akar tanaman. Sistem *hidroponik* banyak diminati oleh masyarakat perkotaan karena perawatannya relatif lebih mudah, pertumbuhan tanaman cenderung lebih cepat, serta kondisi lingkungan tanam lebih bersih karena tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Jenis tanaman yang umum dibudidayakan melalui metode ini antara lain selada, pakcoy, bayam, tomat, cabai, hingga stroberi. Keunggulan utama *hidroponik* adalah nutrisi dapat dikontrol dan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, sehingga hasil panen menjadi lebih maksimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

3. Aquaponik merupakan sistem pertanian terpadu yang mengombinasikan akuakultur atau pemeliharaan ikan dengan sistem *hidroponik*. Dalam sistem ini, limbah organik yang dihasilkan dari ikan, seperti kotoran dan sisa pakan, akan diuraikan oleh bakteri menjadi nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Selanjutnya, air yang telah disaring dan dimanfaatkan oleh tanaman dialirkan kembali ke kolam ikan, sehingga terbentuk suatu siklus tertutup yang saling menguntungkan. Aquaponik dikenal sebagai sistem yang sangat ramah lingkungan karena mampu menghemat penggunaan air hingga sekitar 90–97%, meminimalkan limbah, serta menghasilkan dua produk sekaligus, yaitu sayuran segar dan ikan sebagai sumber protein. Sistem ini sangat sesuai diterapkan di lahan sempit perkotaan dan berpotensi menjadi sumber pangan keluarga sekaligus peluang usaha skala kecil yang menjanjikan.
4. Tabulampot atau tanaman buah dalam pot merupakan teknik menanam pohon buah menggunakan pot atau wadah tertentu sebagai media tanam. Metode ini memungkinkan masyarakat perkotaan untuk tetap menikmati hasil buah meskipun tidak memiliki lahan atau kebun yang luas. Keberhasilan tabulampot sangat ditentukan oleh pemilihan bibit unggul yang sehat, bebas dari penyakit, serta memiliki karakteristik cepat berbuah. Jenis tanaman buah yang umum dijadikan tabulampot antara lain jambu, mangga, jeruk, apel, anggur, dan belimbing. Keunggulan tabulampot terletak pada kemudahan pemindahan tanaman, kemampuan mengontrol pertumbuhan dan ukuran pohon, serta kemampuannya untuk tetap berbuah meskipun ditanam di pekarangan yang terbatas.
5. Selain tanaman pangan, *urban farming* juga mencakup kegiatan budidaya tanaman hias serta tanaman obat keluarga (TOGA) yang memiliki nilai estetika, kesehatan, dan lingkungan yang cukup tinggi bagi masyarakat perkotaan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari *urban farming* karena tidak hanya berorientasi pada produksi pangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas lingkungan dan kenyamanan hunian di kawasan perkotaan. Budidaya tanaman hias dan TOGA umumnya dilakukan di pekarangan rumah, halaman sempit, pot, maupun

wadah lainnya yang disesuaikan dengan kondisi lahan perkotaan, sehingga mudah diterapkan oleh berbagai lapisan masyarakat.

- a. Tanaman hias dalam konteks *urban farming* dapat berupa tanaman berbunga seperti anggrek, mawar, dan melati yang memiliki daya tarik visual serta nilai estetika tinggi. Selain itu, terdapat pula tanaman berdaun indah seperti aglaonema, keladi, dan sirih gading yang diminati karena warna dan bentuk daunnya yang menarik serta relatif mudah dirawat. Tanaman hias juga dapat berupa bonsai yang menonjolkan keindahan bentuk batang, cabang, dan akar, sehingga memberikan kesan artistik sekaligus bernilai ekonomi. Keberadaan tanaman hias di lingkungan perkotaan dapat menciptakan suasana yang lebih sejuk, asri, dan nyaman, serta memberikan efek psikologis positif bagi penghuni rumah.
- b. Tanaman hias dalam konteks *urban farming* dapat berupa tanaman berbunga seperti anggrek, mawar, dan melati yang memiliki daya tarik visual serta nilai estetika tinggi. Selain itu, terdapat pula tanaman berdaun indah seperti aglaonema, keladi, dan sirih gading yang diminati karena warna dan bentuk daunnya yang menarik serta relatif mudah dirawat. Tanaman hias juga dapat berupa bonsai yang menonjolkan keindahan bentuk batang, cabang, dan akar, sehingga memberikan kesan artistik sekaligus bernilai ekonomi. Keberadaan tanaman hias di lingkungan perkotaan dapat menciptakan suasana yang lebih sejuk, asri, dan nyaman, serta memberikan efek psikologis positif bagi penghuni rumah.
- c. Tamanisasi merupakan upaya penghijauan lahan sempit dengan mengombinasikan tanaman hias, TOGA, dan tanaman sayuran dalam satu kesatuan tata ruang yang terencana. Melalui tamanisasi, pekarangan rumah atau ruang terbatas di perkotaan tidak hanya tampak indah secara visual, tetapi juga memiliki fungsi produktif dan ekologis. Konsep ini mendorong pemanfaatan ruang secara optimal, sehingga lingkungan rumah menjadi lebih hijau, sehat, dan bermanfaat bagi kebutuhan sehari-hari. Tamanisasi dalam *urban*

farming juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sistem budidaya tanaman hias, TOGA, dan tamanisasi dalam *urban farming* tidak hanya berperan dalam memperindah kawasan perkotaan, tetapi juga mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, menambah keanekaragaman hayati, serta memperkuat fungsi ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan yang semakin terbatas.

6. Peternakan di Lahan Sempit

Urban farming tidak hanya terbatas pada kegiatan budidaya tanaman, tetapi juga mencakup pemeliharaan hewan ternak dalam skala kecil yang disesuaikan dengan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Kegiatan peternakan ini umumnya dilakukan dengan sistem sederhana, memanfaatkan ruang sempit, serta memperhatikan aspek kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Peternakan dalam *urban farming* berfungsi sebagai sumber tambahan pangan dan gizi, sekaligus sebagai peluang peningkatan ekonomi rumah tangga. Jenis peternakan yang umum dikembangkan di wilayah perkotaan antara lain:

- a. Unggas seperti ayam, bebek, atau itik yang dipelihara untuk menghasilkan telur dan daging sebagai sumber protein bagi kebutuhan keluarga. Pemeliharaan unggas skala kecil relatif mudah dilakukan dan dapat memberikan hasil yang cepat.
- b. Burung yang dipelihara sebagai hobi sekaligus memiliki nilai ekonomi, terutama apabila burung tersebut memiliki nilai jual atau mengikuti kontes tertentu.
- c. Ikan, baik ikan konsumsi seperti lele, nila, dan gurami maupun ikan hias, yang biasanya dipelihara dalam kolam kecil, ember, atau akuarium. Budidaya ikan dalam *urban farming* dapat dilakukan dengan sistem yang hemat air dan lahan.

- d. Kelinci yang dipelihara sebagai sumber daging sehat maupun sebagai hewan peliharaan yang memiliki nilai ekonomi dan relatif tidak membutuhkan lahan luas.

Sistem peternakan dalam *urban farming* ini berkontribusi dalam meningkatkan asupan gizi keluarga, menyediakan sumber pangan hewani yang lebih terjangkau, serta berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga, terutama apabila hasil peternakan tersebut dipasarkan secara berkelanjutan.

2.3.4 Manfaat *Urban Farming*

Menurut Golder (2013) dalam Sulistiyarningsih. (2024), *urban farming* memberikan sejumlah manfaat penting yang secara nyata berkontribusi terhadap keberlanjutan kawasan perkotaan, baik ditinjau dari aspek pemenuhan kebutuhan pangan, pelestarian lingkungan, penguatan sosial, maupun keberlangsungan budaya masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki implikasi strategis dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Secara lebih rinci, berbagai manfaat *urban farming* tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kawasan perkotaan yang kompak sekaligus mandiri dalam pemenuhan pangan. Melalui penerapan *urban farming*, wilayah perkotaan memiliki peluang untuk meningkatkan kemandirian pangan dengan memanfaatkan ruang-ruang terbatas yang tersedia secara optimal. Dengan demikian, ketergantungan terhadap distribusi pangan dari luar kota dapat ditekan secara bertahap, sehingga biaya distribusi menjadi lebih rendah, efisiensi sistem logistik meningkat, serta konsumsi energi yang digunakan untuk transportasi pangan jarak jauh dapat berkurang secara signifikan.
- b. Melestarikan tradisi domestikasi tanaman dan hewan. *Urban farming* tidak hanya berperan sebagai kegiatan produksi pangan semata, tetapi juga menjadi sarana penting dalam menjaga dan melestarikan budaya bercocok tanam yang telah diwariskan secara turun-temurun. Melalui aktivitas ini, masyarakat perkotaan, khususnya generasi muda, dapat belajar secara langsung mengenai proses penanaman, pemeliharaan, hingga pengolahan

hasil pangan. Pengalaman tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian yang lebih tinggi terhadap isu ketahanan pangan serta pentingnya kemandirian pangan di masa yang akan datang.

- c. Membangun lingkungan yang mandiri dan berkelanjutan dalam penyediaan sumber daya pangan. Keberadaan *urban farming* memungkinkan kota untuk membangun sistem penyediaan pangan yang lebih stabil, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari wilayah lain. Kondisi ini memberikan kontribusi positif dalam mengurangi risiko terjadinya krisis pangan, terutama di tengah laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang semakin pesat serta keterbatasan lahan produktif di wilayah sekitar kota.

Urban farming tidak hanya memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat perkotaan, tetapi juga memiliki dampak yang jauh lebih luas terhadap keberlanjutan pembangunan kota secara menyeluruh. Keberadaan dan pengembangan *urban farming* mampu menjadi salah satu instrumen strategis dalam menjawab berbagai tantangan perkotaan, mulai dari keterbatasan lahan, ketergantungan pangan dari luar wilayah, hingga menurunnya kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, *urban farming* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas pertanian, melainkan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan kota yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

- a. Dari sisi ekonomi, pengembangan *urban farming* berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga melalui penghematan biaya pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Masyarakat dapat memproduksi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri, sehingga pengeluaran rumah tangga menjadi lebih efisien. Selain itu, *urban farming* juga membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga apabila hasil produksi dijual, baik dalam skala kecil di lingkungan sekitar maupun melalui pasar lokal. Aktivitas ini secara tidak langsung dapat mendorong tumbuhnya ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat perkotaan.

- b. Dari aspek ekologi, *urban farming* memberikan kontribusi nyata melalui penambahan ruang hijau di kawasan perkotaan yang cenderung padat dan minim vegetasi. Kehadiran ruang hijau ini berperan dalam memperbaiki kualitas udara, meningkatkan daya serap air, serta mengurangi dampak negatif perubahan iklim di wilayah kota. Selain itu, praktik *urban farming* juga mendukung pengurangan limbah, khususnya limbah organik rumah tangga, melalui pemanfaatannya sebagai bahan baku pupuk kompos. Dengan demikian, *urban farming* turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.
- c. Pada aspek sosial dan budaya, *urban farming* mampu memperkaya kehidupan masyarakat perkotaan melalui pelestarian tradisi bercocok tanam yang mulai tergerus oleh modernisasi. Aktivitas ini juga mendorong terjadinya interaksi sosial yang lebih intens antarwarga, baik melalui kerja sama dalam kelompok tani, kegiatan gotong royong, maupun pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Interaksi tersebut dapat memperkuat kohesi sosial, rasa kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan dan komunitas sekitar.
- d. Selain itu, *urban farming* memiliki peranan penting dalam aspek edukasi karena dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran yang kontekstual mengenai lingkungan, pangan, dan keberlanjutan. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan *urban farming*, masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, dapat memahami proses produksi pangan, pentingnya menjaga lingkungan, serta nilai-nilai kemandirian dan tanggung jawab. Aktivitas ini menjadi media pembelajaran yang aplikatif dan mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Lebih lanjut, *urban farming* juga berpotensi dikembangkan sebagai daya tarik wisata berbasis pertanian perkotaan, terutama di tengah keterbatasan ruang terbuka hijau dan minimnya aktivitas pertanian di wilayah kota. Kawasan *urban farming* dapat menjadi destinasi rekreasi yang sekaligus memberikan nilai edukatif bagi masyarakat dan pengunjung.
- f. Di samping itu, *urban farming* turut berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan pangan segar yang lebih aman

dan berkualitas, serta melalui penciptaan lingkungan yang lebih hijau, bersih, dan sehat. Secara keseluruhan, pengembangan *urban farming* memberikan kontribusi multidimensional yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan kota (Nurlaelih, E. E., dkk., 2019).

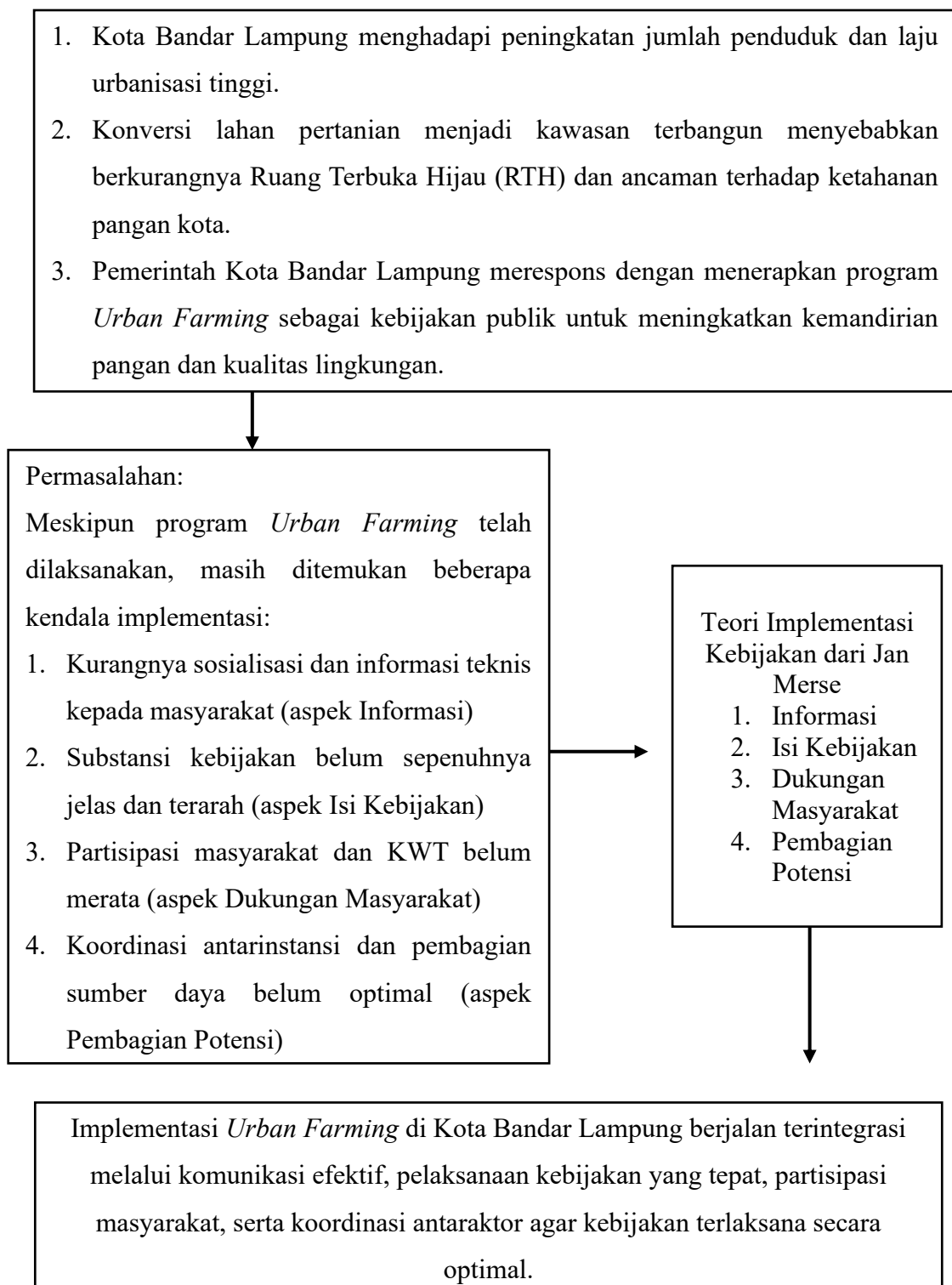
2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfungsi sebagai peta konseptual yang menggambarkan alur logika untuk menghubungkan konsep utama (Implementasi Kebijakan) dengan teori operasional yang relevan (Model Jan Merse). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Program *Urban Farming* oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Logika analisis diawali dari penetapan kebijakan hingga pelaksanaan nyata di lapangan yang dipengaruhi oleh empat dimensi krusial dari Model Jan Merse. Metode kualitatif digunakan untuk menggali data yang kaya dan mendalam mengenai realitas pelaksanaan program di lapangan.

Secara umum, Program *urban farming* di Kota Bandar Lampung dapat dilihat sebagai Kebijakan Publik yang lahir dari upaya Pemerintah Kota untuk merespons isu penyusutan lahan produktif dan ancaman ketahanan pangan lokal. Keberhasilan Implementasi kebijakan ini kemudian diukur dan dianalisis melalui kerangka Model Implementasi Kebijakan Jan Merse. Model Jan Merse mengasumsikan bahwa kinerja implementasi kebijakan di tingkat pelaksana dipengaruhi oleh empat faktor utama yang saling berinteraksi, yaitu: Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, dan Pembagian Potensi. Setiap faktor tidak dianalisis secara terpisah, melainkan sebagai dimensi krusial yang saling memengaruhi dan membentuk satu kesatuan sistem kebijakan yang terintegrasi.

Oleh karena itu, penelitian akan dilakukan secara mendalam melalui metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai realitas pelaksanaan program oleh dinas terkait, serta bagaimana dinamika interaksi antarvariabel ini dialami dan direspons oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai kelompok sasaran utama. Keterkaitan logis antara keempat dimensi ini mulai dari kejelasan legalitas Isi Kebijakan hingga efektivitas alokasi Pembagian Potensi sumber daya kemudian akan menghasilkan kesimpulan mengenai Implementasi Program *Urban*

Farming di Kota Bandar Lampung. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena yang diteliti. Menurut Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada fenomena atau gejala yang terjadi secara alami dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini bersifat mendasar, naturalistik, dan kontekstual, sehingga tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi buatan seperti di laboratorium, melainkan harus dilakukan secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sering disebut sebagai *naturalistic inquiry* atau *field study*, karena peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian dalam lingkungan aslinya untuk memperoleh data yang autentik dan bermakna.

Bogdan dan Taylor (1982) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan, yang diperoleh dari individu serta perilaku yang dapat diamati, dengan pendekatan yang diarahkan pada latar belakang dan subjek penelitian secara holistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial secara utuh dan mendalam sesuai dengan perspektif subjek yang diteliti. Sementara itu, Kirk & Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu tradisi dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam lingkungannya sendiri, serta melibatkan interaksi langsung dengan mereka melalui bahasa, simbol, dan istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai implementasi kebijakan *urban farming* di Kota Bandar Lampung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membedah secara rinci keterkaitan fungsional serta dinamika yang terjadi antara indikator Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, dan Pembagian Potensi, sesuai dengan kerangka Model Implementasi Kebijakan Jan Merse yang digunakan sebagai alat analisis utama dalam penelitian ini.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penajaman ruang lingkup studi yang berfungsi untuk memusatkan perhatian pada inti permasalahan yang akan dikaji. Perumusan fokus secara eksplisit sangat esensial karena menjadi koridor yang memandu peneliti selama proses di lapangan, memastikan observasi dan analisis data tetap terarah dan relevan. Dalam penelitian kualitatif, penetapan fokus ini berperan penting untuk membatasi cakupan studi, sehingga peneliti dapat secara efektif menyaring data yang relevan dan mengesampingkan informasi yang tidak sejalan dengan tujuan penelitian (Sari, E. P. 2021).

1. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Program *Urban Farming* di Kota Bandar Lampung yang dianalisis secara mendalam melalui empat dimensi penting dari Model Implementasi Kebijakan Jan Merse. Berdasarkan model tersebut, fokus penelitian ini akan diturunkan ke dalam empat komponen utama yang menjadi variabel kajian di lapangan, yaitu:

- a. Informasi (Komunikasi)

Fokus penelitian pada dimensi Informasi diarahkan untuk menganalisis kejelasan dan efektivitas proses komunikasi yang terjadi antara pihak pelaksana kebijakan, yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung (Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, Dinas Pangan, BAPPERIDA, Kelurahan di Kota Bandar Lampung, dengan kelompok sasaran utama, yakni Kelompok Wanita Tani (KWT), Kominitas Ayo Menanam, dan Penggiat Hidroponik Mandiri. Hal ini menjadi elemen penting karena minimnya informasi atau adanya disorientasi komunikasi dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian akan berfokus pada seberapa jauh keterbukaan dan kejelasan informasi tersampaikan mengenai

tujuan strategis program, prosedur teknis pelaksanaan, dan manfaat yang dapat diperoleh dari *urban farming* di Bandar Lampung. Selain itu, aspek yang dikaji mencakup efektivitas dan penyuluhan yang dilakukan di lapangan guna memastikan pemahaman teknis dan administratif yang seragam di tingkat KWT. Penelitian juga akan menelusuri bagaimana mekanisme pelaporan dan umpan balik disediakan untuk mengatasi kesenjangan informasi atau disorientasi komunikasi yang mungkin timbul selama masa implementasi program.

b. Isi Kebijakan (Substansi)

Fokus pada dimensi Isi Kebijakan diarahkan untuk mengkaji kualitas substantif dan legalitas kebijakan *urban farming* yang diterapkan di Kota Bandar Lampung. Penelitian akan menelusuri secara mendalam kekuatan dan ketegasan payung hukum program, seperti Peraturan Wali Kota atau sejenisnya, untuk memastikan kebijakan memiliki acuan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting mengingat tingginya tekanan alih fungsi lahan di perkotaan. Selanjutnya, fokus analisis juga mencakup kejelasan tujuan dan sasaran program, yaitu apakah kebijakan tersebut secara akurat dan tepat mampu merespons tantangan spesifik perkotaan seperti alih fungsi lahan dan isu ketahanan pangan. Terakhir, penelitian akan membedah kesesuaian substansi program (jenis bantuan, teknologi, dan skema pendampingan) dengan kebutuhan spesifik Kelompok Wanita Tani (KWT) dan karakteristik wilayah urban di Kota Bandar Lampung.

c. Dukungan Masyarakat (Partisipasi)

Fokus ini secara spesifik menyoroti dimensi relasional dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai indikator fundamental keberhasilan kebijakan *urban farming*. Analisis akan berpusat pada tingkat partisipasi aktif stakeholder non-pemerintah, khususnya KWT, dalam seluruh siklus program, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan operasional di lapangan, hingga mekanisme pengawasan dan evaluasi. Selain aspek relasional, penelitian juga akan mengidentifikasi bentuk dukungan fisik dan non-fisik (misalnya penyediaan lahan, tenaga, atau ide) yang diberikan komunitas lokal terhadap

inisiatif *urban farming*. Keseluruhan temuan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepemilikan (*sense of belonging*) KWT terhadap program, yang merupakan kunci utama untuk menjamin keberlanjutan inisiatif tanpa bergantung penuh pada intervensi pemerintah.

d. Pembagian Potensi (Koordinasi Sumber Daya)

Fokus pada dimensi Pembagian Potensi adalah untuk menganalisis aspek alokasi sumber daya dan koordinasi struktural antar-aktor yang terlibat. Penelitian akan mengukur efektivitas alokasi dan distribusi sumber daya (termasuk anggaran, sarana produksi, serta tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan/PPL) kepada KWT, memastikan sumber daya tersebut tersalurkan secara merata, tepat sasaran, dan tepat waktu. Selain itu, kajian ini juga menyoroti koordinasi dan sinergi yang terjadi antar-dinas terkait (seperti Dinas Pertanian, Dinas Pangan, BAPPERIDA, dan Kelurahan dengan pihak non-pemerintah dalam menjalankan peran dan tanggung jawab. Penelusuran juga mencakup mekanisme yang digunakan oleh aktor pelaksana untuk mengatasi hambatan teknis dan perbedaan kepentingan dalam proses koordinasi sumber daya, yang menjadi penentu utama dalam menjalankan fungsi kebijakan secara terintegrasi.

2. Sejalan dengan rumusan masalah yang kedua, fokus penelitian ini diarahkan pada upaya mengidentifikasi secara lebih rinci dan spesifik berbagai tantangan serta faktor penghambat yang muncul dalam setiap dimensi implementasi Program *urban farming* di Kota Bandar Lampung. Identifikasi hambatan ini didasarkan pada empat dimensi utama dalam Model Jan Merse, sehingga analisis tidak hanya bersifat umum, tetapi terstruktur dan sistematis sesuai kerangka teoretis yang digunakan. Pengkajian terhadap tantangan dan hambatan dilakukan dengan menelusuri berbagai kendala yang muncul pada aspek informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, serta pembagian potensi antar-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan sumber daya, kurang optimalnya alur komunikasi, perbedaan kepentingan antar-pemangku kepentingan, hingga rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam beberapa konteks pelaksanaan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian kualitatif seringkali berawal dari adanya fenomena menarik yang mendorong keingintahuan peneliti. Oleh karena itu, pemilihan lokasi penelitian menjadi langkah penting yang tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik atau geografis, tetapi juga harus mampu menggambarkan dinamika kehidupan sosial dan aktivitas yang relevan di dalamnya. Lokasi yang ideal harus memiliki keselarasan yang kuat dengan rumusan masalah agar dapat menjadi sumber data yang substansial. Dengan kata lain, lokasi tersebut harus mampu menyediakan informasi yang kaya dan mendalam, serta terbuka untuk kehadiran peneliti dalam jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data (Sari, E. P. 2021).

Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kota Bandar Lampung, yang didasarkan pada pertimbangan kuat bahwa kota ini secara aktif dan berkelanjutan mengimplementasikan Program *urban farming* sebagai kebijakan strategis untuk merespons tantangan mendesak perkotaan, yaitu penyusutan lahan produktif dan ancaman ketahanan pangan lokal. Fenomena ini menunjukkan adanya keputusan pemerintah untuk bertindak (*policy choice*) yang merupakan subjek kajian implementasi kebijakan. Lebih lanjut, Program *urban farming* di Kota Bandar Lampung melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Pangan, BAPPERIDA, aparaturnya Kelurahan, serta aktor non-pemerintah terkait yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT), Komunitas Ayo Menanam, dan Penggiat Hidroponik Mandiri, kemudian untuk dianalisis menggunakan empat dimensi dari Model Implementasi Kebijakan Jan Merse (Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, dan Pembagian Potensi).

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data diperoleh dari dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian tanpa melalui perantara, sedangkan sumber sekunder merupakan data yang didapatkan melalui pihak lain atau dokumen pendukung (Sugiyono, 2022). Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

1. Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi *urban farming* di Kota Bandar Lampung. Data ini digali dari sumber pertama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai proses kolaborasi, seperti perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Pangan, BAPPERIDA, aparaturnya Kelurahan, serta aktor non-pemerintah terkait yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT), Komunitas Ayo Menanam, dan Penggiat Hidroponik Mandiri. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas *urban farming* di lokasi penelitian. Dari data ini, peneliti mendapatkan gambaran nyata mengenai bagaimana proses implementasi berlangsung, bentuk peran masing-masing aktor, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan program *urban farming*.
2. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau literatur terkait. Data sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, skripsi, peraturan daerah, dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi, hingga pemberitaan media massa yang membahas implementasi *urban farming* di Kota Bandar Lampung. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder berupa statistik pertanian, laporan program dari Dinas Pertanian, serta dokumen dari KWT yang berkaitan dengan perkembangan dan kegiatan *urban farming*. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis dari temuan primer yang diperoleh di lapangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Iba (2023), teknik pengumpulan data merupakan cara atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini berfungsi sebagai sarana utama bagi peneliti dalam menggali data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji. Dalam praktik penelitian sosial, peneliti sering kali tidak hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data, melainkan mengombinasikan beberapa teknik secara bersamaan.

Penggunaan lebih dari satu teknik dimaksudkan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh, mendalam, dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi guna mendukung analisis implementasi kebijakan *urban farming* di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini telah dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Oktober 2025 hingga Januari 2026, sehingga seluruh data yang diperoleh merupakan hasil dari proses penelitian lapangan yang telah dilakukan secara langsung. Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu pertemuan antara dua individu atau lebih yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab secara langsung. Melalui wawancara, peneliti dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu topik, peristiwa, atau pengalaman yang dialami oleh informan. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian, sekaligus ketika peneliti menggali informasi secara lebih rinci dan mendalam dari informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara menjadi teknik penting untuk memahami secara langsung pelaksanaan kebijakan *urban farming* dari sudut pandang para pelaksana dan pihak terkait. Menurut Sugiyono (2023), wawancara dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Pemilihan jenis wawancara disesuaikan dengan kebutuhan data serta kedalaman informasi yang ingin diperoleh peneliti.

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan ketika peneliti telah mengetahui dengan jelas jenis informasi yang ingin diperoleh dari informan. Dalam wawancara ini, instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan telah disusun secara sistematis sebelum kegiatan wawancara dilakukan. Pertanyaan yang

diajukan kepada setiap informan bersifat sama, sehingga memungkinkan adanya konsistensi data antarresponden. Bahkan, dalam beberapa kasus, alternatif jawaban juga telah disiapkan untuk memudahkan proses pengumpulan dan pengelompokan data. Wawancara terstruktur memungkinkan lebih dari satu pewawancara terlibat, dengan catatan seluruh pewawancara telah mendapatkan pelatihan agar memiliki pemahaman dan keterampilan yang seragam. Dalam pelaksanaannya, wawancara terstruktur dilengkapi dengan alat bantu seperti *record* menggunakan gawai, dokumentasi foto, kertas, dan pena guna membantu kelancaran serta ketepatan proses pencatatan data.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur termasuk ke dalam kategori *in-depth interview* karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini digunakan untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka dan mendalam, dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi informan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta ide-ide yang dimilikinya. Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti tetap menyiapkan pedoman wawancara sebagai acuan, namun tidak membatasi secara ketat urutan maupun redaksi pertanyaan. Peneliti dituntut untuk mendengarkan secara cermat, responsif terhadap jawaban informan, serta mencatat informasi penting yang disampaikan selama proses wawancara berlangsung. Melalui pendekatan wawancara semi terstruktur, peneliti menyesuaikan dan mengembangkan pertanyaan secara dinamis sesuai dengan alur pembicaraan dan jawaban informan. Proses wawancara umumnya diawali dengan percakapan umum untuk menciptakan suasana yang nyaman, sebelum secara bertahap mengarah pada inti permasalahan penelitian.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan secara dinamis sesuai jawaban informan. Prosesnya seringkali dimulai dengan percakapan umum sebelum masuk ke inti permasalahan. Berikut disajikan tabel informan wawancara dalam penelitian ini:

Tabel 4. Data Informan Penelitian

No	Nama Informan dan Jabatan	Tanggal	Jabatan	Instansi
1	Dhenok Nuniek Auliya, S.P., M.P.	28 Oktober 2025	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
2	Agus Mutia	13 November 2025	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
3	Ine Indriastuti	15 Januari 2026	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
4	Cepi	13 Januari 2026	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
5	Laila Yusro	10 Desember 2025	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
6	Suherman	4 November 2025	Fungsional Perencana Muda	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
7	Ir. Sunarti	10 Desember	Fungsional Analis Ahli Muda Ketahanan Pangan	Dinas Pangan Kota Bandar Lampung
8	Ruslan, S.I.Kom	13 November 2025	Lurah Sidodadi, Kecamatan Kedaton	Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton
9	Suyadmi	13 November 2025	Ketua Sedap Malam	KWT Sedap Malam
10	Ratu Maryana	13 November 2025	Humas Sedap Malam	KWT Sedap Malam
11	Desti	15 November 2025	Ketua KWT Delima	KWT Delima
12	Mardalena	15 November 2025	Wakil KWT Delima	KWT Delima
13	Betty Mailina	15 November 2025	Anggota KWT Barokah Way Pios	KWT Barokah Way Pios
14	Heni	15 Januari 2026	Ketua KWT Fortuna	KWT Fortuna
15	Anggun	15 Januari 2026	Bendahara KWT Fortuna	KWT Fortuna
16	Puwati	15 Januari 2026	Sekretaris KWT Fortuna	KWT Fortuna
17	Yuli Astuti	13 November 2025	Wakil Bendahara	Komunitas Ayo Menanam
18	Aji	29 Oktober 2025	Penggiat Hidroponik Mandiri	Penggiat Hidroponik Mandiri di Kota Bandar Lampung

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

2. Observasi

Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data primer. Wada, F. H dkk (2024) mendefinisikan observasi sebagai pengamatan langsung terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan non-partisipan, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat luar tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diobservasi. Fokus pengamatan adalah pada interaksi para aktor yang terlibat selama kegiatan-kegiatan terkait program *urban farming* berlangsung. Instrumen yang digunakan untuk mendukung observasi ini meliputi: pedoman pengamatan untuk mencatat peristiwa sesuai indikator penelitian, dokumentasi foto untuk merekam bukti visual, serta rekaman suara (atas seizin informan) untuk menangkap detail percakapan.

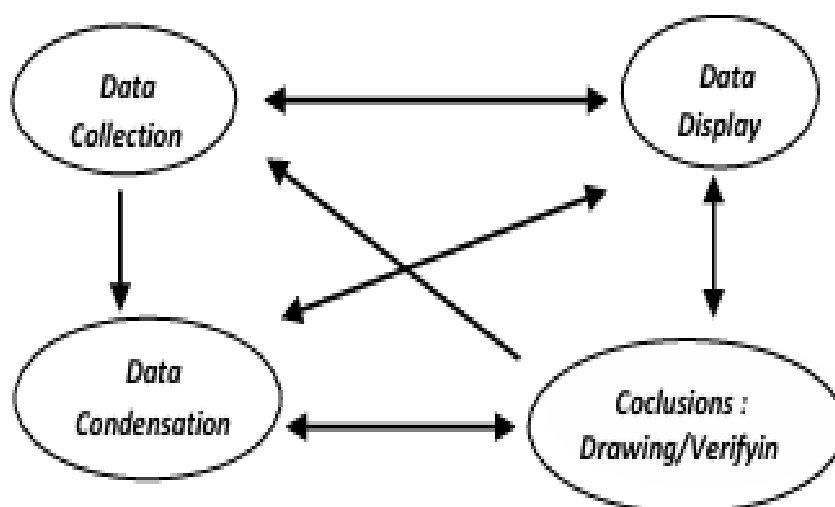
3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2023), dokumen adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi dimanfaatkan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang berkaitan dengan implementasi Program *urban farming* di Kota Bandar Lampung. Dokumen yang digunakan meliputi dokumen resmi dari instansi pemerintah daerah yang terlibat, khususnya Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung. Dokumen tersebut berupa peraturan, pedoman teknis, laporan kegiatan, data program, serta arsip administratif yang mendukung pelaksanaan Program *urban farming*.

Selain itu, dokumentasi juga mencakup foto-foto kegiatan, serta catatan pelaksanaan program di lapangan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung pada periode Juni 2025 hingga Januari 2026. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual implementasi program, sekaligus untuk menelusuri kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, teknik dokumentasi dalam penelitian ini berperan penting dalam memperkuat validitas data dan memperdalam analisis terhadap setiap dimensi implementasi Program *urban farming* di Kota Bandar Lampung.

3.6 Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2023). Model analisis ini terdiri atas empat komponen utama yang saling berkaitan, yaitu Pengumpulan Data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Keempat komponen tersebut berlangsung secara bersamaan dan berulang selama proses penelitian kualitatif.



Gambar 4. Komponen Analisis Data Model Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam Sugiyono (2023)

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi, maupun kombinasi dari ketiganya yang dikenal dengan istilah triangulasi. Tahap ini berlangsung selama periode penelitian, yaitu sejak bulan Juni hingga Januari 2026, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang beragam, mendalam, dan kontekstual terkait implementasi Program *urban farming* di Kota Bandar Lampung. Rentang waktu tersebut memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan secara lebih utuh, baik dari sisi aktor pelaksana, mekanisme birokrasi, maupun partisipasi masyarakat yang terlibat secara langsung dalam program.

2. Kondensasi Data (*data condensation*)

Tahap kondensasi data mencakup kegiatan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, serta mentransformasi catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen, maupun temuan empiris lainnya. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sejak data mulai dikumpulkan hingga tahap analisis akhir, sehingga data yang semula tersebar dan kompleks dapat disusun menjadi lebih terstruktur dan bermakna. Melalui kondensasi data, informasi yang relevan dengan fokus penelitian menjadi lebih kuat dan mudah dianalisis tanpa menghilangkan esensi dari temuan lapangan.

3. Penyajian Data (*data display*)

Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah terkondensasi ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, bagan, maupun dokumentasi visual lainnya. Tujuannya untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola, hubungan, serta kecenderungan antar data, sehingga hasil temuan lapangan dapat dibaca secara sistematis dan logis sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses verifikasi yang berkesinambungan, di mana peneliti menguji konsistensi dan validitas data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kesimpulan tidak ditarik secara tiba-tiba, melainkan melalui proses peninjauan ulang terhadap data yang telah disajikan, sehingga interpretasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi empiris di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, penerapan model analisis data Miles, Huberman, dan Saldana dinilai relevan karena membantu peneliti mengorganisir data yang kompleks terkait implementasi Program *urban farming* berdasarkan empat dimensi Model Jan Merse. Proses kondensasi memfokuskan data pada aspek penting seperti kejelasan Informasi dan Isi Kebijakan, sementara penyajian data memudahkan identifikasi pola hubungan antara Dukungan Masyarakat dan Pembagian Potensi. Melalui proses tersebut, penarikan kesimpulan memberikan gambaran yang jelas mengenai keberhasilan dan hambatan implementasi kebijakan dalam mendukung tujuan Program *urban farming* di Kota Bandar Lampung.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data yang diadaptasi dari Sugiyono (2023), di mana dalam penelitian kualitatif terdapat empat kriteria utama untuk menguji validitas temuan, yaitu: *credibility* (kredibilitas), *transferability* (transferabilitas), *dependability* (dependabilitas), dan *confirmability* (konfirmasiabilitas).

1. *Credibility* (Uji Kredibilitas) bertujuan untuk memastikan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini, kredibilitas akan diuji melalui beberapa cara, yaitu:
 - a. Perpanjangan Observasi: Peneliti melakukan perpanjangan waktu observasi dan wawancara di lapangan guna membangun hubungan yang lebih mendalam (*rapport*) dengan informan serta memperoleh data yang lebih kaya dan valid. Perpanjangan observasi dilakukan karena kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan pada Juni hingga awal Agustus 2025 dilakukan di lokasi yang sama dengan lokasi penelitian, sehingga peneliti memiliki keterlibatan lapangan yang lebih panjang. Observasi lanjutan kemudian dilanjutkan kembali pada akhir Oktober 2025 hingga penelitian selesai pada Januari 2026 dengan melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Pangan, BAPPERIDA, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) sesuai dimensi Model Jan Merse.
 - b. Triangulasi Sumber: Triangulasi didefinisikan sebagai teknik pengecekan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Pada penelitian ini, triangulasi sumber akan digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai aktor implementasi. Data dari Dinas Pertanian akan diverifikasi silang dengan data dari KWT, serta Dinas Pangan, BAPPERIDA, Komunitas Ayo Menanam, dan Penggiat Hidroponik Mandiri. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan seimbang mengenai implementasi Program *urban farming* dari berbagai sudut pandang terkait variabel Jan Merse.
 - c. Validasi Informan (*Member Check*): Proses ini dilakukan dengan mengonfirmasi kembali data atau interpretasi temuan kepada informan

kunci. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa analisis peneliti sesuai dengan realitas yang dialami oleh para *stakeholder*. Dalam penelitian ini, *member check* akan melibatkan perwakilan dari Dinas Pertanian, perwakilan Dinas Pangan, perwakilan BAPPERIDA, pengurus KWT, pengurus Komunitas Ayo Menanam, dan Penggiat Hidroponik Mandiri untuk memvalidasi interpretasi peneliti mengenai realitas pelaksanaan di lapangan yang mencakup kejelasan Informasi, kesesuaian Isi Kebijakan, tingkat Dukungan Masyarakat, dan efektivitas Pembagian Potensi, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. *Transferability* (Validitas Eksternal) menunjukkan sejauh mana hasil penelitian ini dapat relevan atau diterapkan pada konteks atau situasi lain. Agar pembaca dapat memahami dan menilai kemungkinan transferabilitas temuan ini, peneliti menyajikan laporan dalam bentuk deskripsi naratif yang rinci, jelas, dan sistematis. Paparan mendalam mengenai konteks Implementasi Program *urban farming* di Kota Bandar Lampung disajikan secara komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi pelaksanaan pada setiap indikator Model Jan Merse, sehingga pembaca dapat menilai relevansi temuan penelitian ini untuk konteks kebijakan serupa.
3. *Dependability* (Reliabilitas) mengacu pada konsistensi dan keandalan proses penelitian, sehingga jika diulang oleh peneliti lain dalam kondisi yang sama, hasilnya cenderung serupa. Dalam penelitian ini, uji *dependability* dilakukan melalui proses audit oleh dosen pembimbing. Dosen pembimbing memeriksa seluruh alur penelitian, mulai dari proses observasi di lapangan, penentuan informan, pengolahan data, hingga penarikan kesimpulan, untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara logis, sistematis, dan konsisten.
4. *Confirmability* (Objektivitas) bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berasal dari data yang diperoleh di lapangan, bukan dari bias atau pandangan pribadi peneliti. Uji ini terpenuhi jika temuan penelitian dapat dilacak kembali ke sumber datanya. Pada penelitian ini, objektivitas hasil penelitian telah diuji dan diverifikasi melalui proses akademik yang meliputi bimbingan intensif dengan dosen pembimbing, serta tahapan seminar proposal, seminar hasil, dan ujian komprehensif yang melibatkan dosen pembahas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan *urban farming* di Kota Bandar Lampung, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

1. Implementasi kebijakan *urban farming* di Kota Bandar Lampung telah berjalan dan menunjukkan adanya upaya nyata pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan lahan pekarangan serta peningkatan ketahanan pangan keluarga, namun belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui berbagai program seperti Mantap Bu Tani, Pelangi Pagiku, Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), serta program lintas sektor seperti Hunian Hijau Masyarakat (H2M). Penyampaian informasi dan pendampingan dilakukan melalui pertemuan rutin, peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta pemanfaatan komunikasi digital seperti grup *WhatsApp* yang secara operasional terbukti mempercepat aliran informasi dan koordinasi. Namun demikian, efektivitas implementasi masih belum merata antar kelompok karena perbedaan tingkat keaktifan KWT, ketergantungan pada figur penggerak, serta keterbatasan pendampingan yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya terinternalisasi secara konsisten di tingkat pelaksana dan kelompok sasaran.
2. Tantangan utama dalam implementasi kebijakan *urban farming* di Kota Bandar Lampung terletak pada aspek desain dan implementasi kebijakan, bukan semata-mata pada keterbatasan kapasitas atau partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KWT pada dasarnya memiliki

kemauan dan partisipasi yang cukup baik, namun pelaksanaan *urban farming* belum didukung oleh regulasi formal yang secara khusus mengatur substansi, mekanisme, pembagian peran lintas sektor, serta jaminan keberlanjutan program. Ketiadaan payung hukum berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota menyebabkan kebijakan bersifat programatik dan bergantung pada kebijakan teknis tahunan, sehingga rentan terhadap fluktuasi anggaran dan perubahan prioritas pembangunan. Akibatnya, keberlanjutan *urban farming* sangat ditentukan oleh konsistensi regulasi, intensitas pendampingan oleh PPL, serta kejelasan koordinasi lintas sektor. Lemahnya aspek-aspek tersebut berdampak pada ketidakkonsistenan pelaksanaan program, belum meratanya manfaat yang diterima kelompok sasaran, serta terbatasnya kontribusi *urban farming* dalam mendukung ketahanan pangan perkotaan dan pembangunan kota yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan implementasi kebijakan *urban farming* di Kota Bandar Lampung.

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung

Pemerintah Kota Bandar Lampung disarankan untuk menyusun dan menetapkan regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan *urban farming*, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwali). Regulasi tersebut perlu memuat tujuan kebijakan, sasaran program, mekanisme pelaksanaan, pembagian peran lintas perangkat daerah, skema pendanaan, serta indikator keberhasilan dan keberlanjutan program. Keberadaan payung hukum yang jelas akan memberikan kepastian hukum, menjaga konsistensi kebijakan lintas periode pemerintahan, serta memperkuat legitimasi pemanfaatan lahan pekarangan maupun lahan publik perkotaan, termasuk potensi pengembangan *rooftop farming* dan kebun komunitas.

2. Dinas Pertanian dan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung

Dinas terkait disarankan untuk memperkuat desain implementasi kebijakan dengan menyusun standar operasional prosedur (*SOP*) dan pedoman teknis tertulis yang mudah dipahami oleh Kelompok Wanita Tani (KWT). *SOP* tersebut penting untuk memastikan keseragaman pelaksanaan di lapangan, mengurangi ketergantungan pada arahan informal, serta meminimalkan perbedaan interpretasi antar kelompok. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pendampingan berkelanjutan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), tidak hanya pada tahap awal program, tetapi juga pada fase pasca-bantuan guna menjaga konsistensi aktivitas dan keberlanjutan *urban farming*.

3. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah lain seperti kelurahan, kecamatan, dinas lingkungan hidup, serta komunitas penggiat *urban farming* non-KWT. Pembagian peran yang lebih jelas akan mendorong optimalisasi sumber daya, memperluas jangkauan program, serta menghindari ketergantungan pelaksanaan hanya pada satu instansi. Keterlibatan aktif kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah juga penting untuk menjaga kesinambungan komunikasi, pengawasan, dan dukungan moril bagi kelompok masyarakat.

4. Optimalisasi Sistem Informasi dan Komunikasi

Pemanfaatan media komunikasi *digital* seperti grup *WhatsApp* yang selama ini terbukti mempercepat aliran informasi perlu diintegrasikan secara lebih sistematis dalam mekanisme pelaporan dan *monitoring* program. Pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan sistem pelaporan sederhana berbasis *digital* yang dilengkapi dengan jadwal pendampingan rutin dan *feedback* yang terstruktur. Namun demikian, komunikasi *digital* perlu tetap diimbangi dengan kunjungan lapangan dan interaksi tatap muka secara berkala guna membangun kepercayaan, memperkuat pemahaman teknis, serta menjaga motivasi kelompok sasaran.

5. Penguatan Kapasitas dan Kemandirian Kelompok Wanita Tani (KWT)

KWT disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas internal melalui penguatan kepemimpinan kelompok, pembagian peran yang jelas antar anggota, serta pengembangan inisiatif mandiri dalam pengelolaan *urban farming*. Upaya ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah dan memperkuat keberlanjutan program. Pemerintah daerah dapat mendukung hal ini melalui pelatihan kewirausahaan, pengolahan hasil, serta fasilitasi akses pasar agar *urban farming* tidak hanya berorientasi pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga bernilai ekonomi.

6. Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan *urban farming* dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur secara lebih objektif dampak kebijakan terhadap ketahanan pangan keluarga, pendapatan rumah tangga, dan kualitas lingkungan perkotaan. Selain itu, penelitian komparatif antar daerah yang telah memiliki regulasi formal *urban farming* dapat memberikan pembelajaran kebijakan (*policy learning*) yang relevan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyempurnakan desain kebijakan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/E-book

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Iba, Z. (2023). Teknik Pengumpulan Data Penelitian. In CV. EUREKA MEDIA AKSARA. CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. *Gorontalo: UNG Press Gorontalo*.
- Nurlaelih, E. E., & Damaiyanti, D. R. R. (2019). *Urban farming untuk ketahanan pangan*. Universitas Brawijaya Press.
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., ... & Seran, D. A. N. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi.
- Wada, F. H., Pertiwi, A., Hasiolan, M. I. S., Lestari, S., Sudipa, I. G. I., Patalatu, J. S., & Rahman, A. (2024). *Buku ajar metodologi penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Jurnal-Jurnal

- Abdillah, F. H., Samudra, A. A., Tuti, R. W., & Salam, R. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN DI KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN. *Journal of Syntax Literate*, 7(3).
- Adetya, A. (2024). Optimasi program urban farming untuk mengatasi kerawanan pangan di daerah perkotaan. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, 6(1), 766-770.
- Afriyanni, G., & Amri, K. (2024). Potensi Keberlanjutan Urban Farming Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Di Kota Pekanbaru: Perspektif Pelaku Urban Farming. *IIPTEKIN J. Kebijak. Pembang. dan Inov*, 7(1), 26-36.
- Amelia, S., & Nawangsari, E. R. (2021). Implementasi Program “Urban Farming” Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya). *Jurnal Governansi*, 7(2), 121-130.
- Cellindita, S., & Fitrianti, A. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE IN EFFORTS TO IMPROVE FOOD SECURITY THROUGH URBAN FARMING IN BANDUNG CITY. *Jurnal Honai*, 4(2).
- Danugroho, A. (2022). URGENSI PERAN MASYARAKAT PERKOTAAN DALAM PROGRAM “URBAN FARMING” SEBAGAI DAYA DUKUNG KETAHANAN PANGAN DI MASA PANDEMI. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 3(1), 15–22.
- Elvaretta, I. D., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM URBAN FARMING DI KELURAHAN BAMBANKEREP KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1-17.

- Fabregas, R., Kremer, M., & Schilbach, F. (2019). Realizing the potential of digital development: The case of agricultural advice. *Science*, 366(6471), eaay3038.
- Fajaroh, I., Murdiyanto, E., & Budiarto, B. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Urban Farming Oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 23(1), 57-71.
- Gea, M. P., Zendrato, R. J., Telaumbanua, S. O., & Ndraha, A. B. (2025). Pertanian Perkotaan, Solusi Inovatif untuk Ketahanan Pangan di Tengah Kota. *Flora: Jurnal Kajian Ilmu Pertanian dan Perkebunan*, 2(1), 188-198.
- Haryuni, H., Priyadi, S., Suswadi, S., Rumaningsih, M., & Aziez, A. F. (2021, September). PENGEMBANGAN PERTANIAN PERKOTAAN JENIS DAN PENGELOLAANNYA (REVIEW ARTIKEL). In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL DIES NATALIS UTP SURAKARTA* (Vol. 1, No. 01, pp. 155-163).
- Hertati, D., Arif, L., & Nafi'ah, B. A. (2023). Development of Urban Farming as a Strategy to Support Food Security. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 108-117.
- HIDAYATULLAH, S. Peran Kelompok Wanita Tani Hijau Daun Warakas dalam Pemberdayaan Lingkungan Berbasis Urban Farming.
- Klerkx, L., Jakku, E., & Labarthe, P. (2019). A review of social science on digital agriculture, smart farming and agriculture 4.0: New contributions and a future research agenda. *NJAS-Wageningen journal of life sciences*, 90, 100315.
- Kurnia Sri Dewi, Yusuf Hariyoko, & Hasan Ismail. (2025). Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Urban Farming di Surabaya. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(3), 01–16.
<https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i3.936>

- Iqbal, M., Septiana, N., & Nisa, A. F. (2025). Pola Komunikasi Kelompok Dalam Implementasi Program Urban Farming Di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru (Studi Kasus Kelompok Cempaka Berkah). *Frontier Agribisnis*, 9(2), 94-100.
- Islami, S. A., Budiarti, T., & Makalew, A. D. N. (2025). Kajian Implementasi dan Manfaat Pertanian Perkotaan pada Kelompok Tani di Kota Bogor. *Jurnal Penyuluhan*, 21(01), 74-90.
- Maulana, R. A., Warsono, H., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Urban farming: Program pemanfaatan lingkungan untuk pengembangan pertanian perkotaan di Kota Semarang. *Perspektif*, 11(4), 1329-1335.
- Mashita, S. M., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2023). Sinergitas stakeholder dalam program kampung tematik kuliner di Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 409-427.
- Natalia, A., Putri, M., Aulia, S., & Januartini, D. (2025). GERAKAN URBAN FARMING: OPTIMALKAN LAHAN SEMPIT UNTUK KEMANDIRIAN PANGAN WARGA SRENGSEM. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9).
- Nazri, N. M., Sulaiman, S. S., Samsudin, P., & Khirudin, M. A. (2025). Strengthening the laws regulating urban farming initiatives for food security in Malaysia. *Geografia*, 21(3), 159-171.
- Nugroho, R. W., Kusnandar, K., & Sutrisno, J. (2022, June). PERAN KELOMPOK WANITA TANI DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN MELALUI PRAKTIK URBAN FARMING DI KOTA MAGELANG. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis* (Vol. 6, No. 1, pp. 420-424).
- Octarino, C. N. (2023). Efektivitas Pertanian Perkotaan (Urban Farming) dalam Mitigasi Urban Heat Island di Kawasan Perkotaan. *ATRIUM: Jurnal Arsitektur*, 8(3), 189-198.

- Oktarina, S., Purnaningsih, N., & Hapsari, D. R. (2023). Praktik Urban Farming bagi Wanita Tani untuk Ketahanan Pangan Keluarga di Masa Pandemi. *Jurnal Penyuluhan*, 19(02), 356-367.
- Pratio, G. A., Rohmah, S. N., Akbarsyah, M. A., & Supriyanto, A. E. (2024). Konsep urban farming pada kota tanpa lahan pertanian. *Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta*, 3(2), 122-141.
- Rahmawati, I., Ariyani, Y. N., & Fitriani, A. (2024). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Urban Farming di Kampung Samtama, Jakarta Pusat. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 6(2), 55-67.
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan dimensi strategi ketahanan pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35-48.
- Rosmiati, M., Sulistyawati, E., Aos, A., Sumardi, D., Setiawati, Y., Husyari, U. D., ... & Asyiah, N. (2023). PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN URBAN FARMING UNTUK MEMENUHI KETERSEDIAAN PANGAN DI WILAYAH SEKITAR IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA. *Prospek Agribisnis*, 2
- Sari, F. F. (2022). Collaborative Governance in Kelompok Wanita Tani (KWT) Women's Empowerment Programs to Realize Food Security in Cilegon City. *International Journal of Social Sciences Review*, 3(1), 34-48.
- Sen, L. T. H., Phuong, L. T. H., Chou, P., Dacuyan, F. B., Nyberg, Y., & Wetterlind, J. (2025). The Opportunities and Barriers in Developing Interactive Digital Extension Services for Smallholder Farmers as a Pathway to Sustainable Agriculture: A Systematic Review. *Sustainability*, 17(7), 3007.
- Senthamizh, R. (2025). Urban agriculture in a changing world: a thematic review of global trends, innovations, governance, and pathways to sustainability. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 9, 1624426.
- Septya, F., Rosnita, R., Yulida, R., & Andriani, Y. (2022). Urban farming sebagai upaya ketahanan pangan keluarga di Kelurahan Labuh Baru Timur Kota

- Pekanbaru. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 105-114.
- Setyaningrum, S. D., Ati, N. U., & Suyeno, S. (2021). Implementasi Program Urban Farming Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Perkotaan (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang). *Respon Publik*, 15(4), 75-82.
- Sinaga, A. S., Sinurat, A., & Saragih, H. (2025). Zonasi Ruang Terbuka Hijau dalam Mendukung Pengelolaan Lingkungan Perkotaan yang Berkelanjutan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2257–2264.
- Sinatra, F., Azhari, D., Asbi, A. M., & Affandi, M. I. (2022). Prinsip Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Planologi*, 19(1), 19-36.
- Siregar, N. (2022). Menentukan model implementasi kebijakan dalam menganalisis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator (PKA). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713-722.
- Suryani, S., Nurjismi, R., & Fitri, R. (2020). Pemanfaatan lahan sempit perkotaan untuk kemandirian pangan keluarga. *Jurnal Ilmiah Respati*, 11(2), 93-102.
- Unay-Gailhard, Í., Chaskin, R. J., & Brennan, M. A. (2025). How do urban agriculture initiatives communicate on farming across society? An exploration of awareness, responsibility, and pride messages on social media. *Agriculture and Human Values*, 1-17.
- Udisha, O., & Ambily Philomina, I. G. (2024). Bridging the digital divide: Empowering rural women farmers through mobile technology in Kerala. *Sustainability*, 16(21), 9188.
- Wahyudi, D. (2024). Fenomena Urbanisasi Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Kota Metropolitan. *Literacy Notes*, 1(2), 1–12.
<https://liternote.com/index.php/ln/article/view/51>

Wijaya, K., Permana, A. Y., Hidayat, S., & Wibowo, H. (2020). Pemanfaatan urban farming melalui konsep eco-village di kampung paralon Bojongsoang kabupaten Bandung. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 4(1), 16-22.

Wibisono, W.S., & Malik, A. (2025). Analisis Peran Stakeholder dalam Pelaksanaan Urban Farming di RW 01, Kelurahan Manyaran, Kota Semarang. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*.

Wulandari, S., & Tukiman, T. (2023). Implementasi Program Urban Farming pada Kelompok Tani Subur Kedurus Kota Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(3), 334-339.

Skripsi/Tesis/Laporan

Novia, M., Susilastuti, D., & Fitriyanti, L. (2024). Laporan akhir penelitian unggulan perguruan tinggi (Hibah PPUPT-UNBOR 2023): Studi keterlibatan masyarakat dan faktor-faktor pembentuk keberlanjutan urban farming di DKI Jakarta. Universitas Borobudur.

Rahman, S. A. (2018). Implementasi program urban farming di kawasan permukiman dalam peningkatan persentase ruang terbuka hijau di Kota Makassar (Skripsi). Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sulistiyaningsih. (2024). *PERAN KELOMPOK TANI GABUNGAN SEMUA GANG (GSG 07) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM URBAN FARMING DI KELURAHAN KEMBANGAN UTARA JAKARTA BARAT* (Bachelor's thesis, Falkutas Dakwah Dan Komunikasi).

SYAHRUL, M. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN URBAN FARMING TERHADAP OPTIMASI PEMANFAATAN RUANG DI KOTA MAGELANG.

Zulfatunasuroh (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Urban Farming Melalui Kelompok Wanita Tani Cempaka Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2023). Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Bandar Lampung: Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2021). Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung: Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Banjarbaru. (2022). Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan ruang terbuka untuk pertanian, peternakan, dan perikanan perkotaan (urban farming). Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 36.

Pemerintah Kota Semarang. (2021). Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di Kota Semarang. Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 24.

Situs Website

Badan Pusat Statistik. (2024). *Dinamika konsumsi lahan wilayah urban di Indonesia*. Jakarta: BPS. Diakses dari Dinamika Konsumsi Lahan Wilayah Urban di Indonesia - Badan Pusat Statistik Indonesia

Saputra, B. Z. (2024, 10 7). *Lahan pertanian di Bandar Lampung terbatas, Distan galakan program urban farming*. Retrieved from Tribun Lampung: <https://lampung.tribunnews.com/2024/10/07/lahan-pertanian-di-bandar-lampung-terbatas-distan-galakan-program-urban-farming>